

# GUSTI PANGERAN PURUBOYO

HASIL KARYA DAN PENGABDIANNYA



Direktorat  
Kebudayaan

8

oleh: MUYONO

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL  
1982/1983

MILIK DEP. P DAN K  
TIDAK DIPERDAGANGKAN

# **GUSTI PANGERAN PURUBOYO**

## **HASIL KARYA DAN PENGABDIANNYA**

Oleh : MULYONO

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIRFKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

1982 / 1983

**Penyunting :**

- 1. Sutrisno Kutoyo**
- 2. Drs. M. Soenyata Kartadarmadja**

**Gambar Kulit**

**O l e h :**

**IDHAM PALADA**

**SAMBUTAN**  
**DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan.

Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1982.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123

## **KATA PENGANTAR**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain mengerjakan penulisan biografi Tokoh yang telah berjasa dalam masyarakat.

Adapun pengertian Tokoh dalam naskah ini ialah seseorang yang telah berjasa atau berprestasi di dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pengabdian, ilmu pengetahuan, keolahragaan dan seni budaya nasional di Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan biografi Tokoh ini ialah, bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahir, melainkan juga mengejar kepuasan batin, dengan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Tujuan penulisan ini khususnya juga untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang bertujuan menimbulkan perubahan yang membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Juni 1982

**PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
SEJARAH NASIONAL**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMBUTAN .....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	1
BAB I. SILSILAH G.P. PURUBOYO .....	5
BAB III. PADA JAMAN PENJAJAHAN BELANDA ...	11
1. Pengalaman Masa Kecil .....	11
2. Di Negeri Belanda .....	13
3. Kembali ke Indonesia .....	17
4. Menjadi Pembesar dalam lingkungan Kraton Yogyakarta .....	18
BAB III. PADA JAMAN PENJAJAHAN JEPANG .....	27
1. Pemerintahan Pendudukan Jepang .....	27
2. Keadaan di Kraton Kasultanan Yogyakarta .	39
3. Kegiatan B.P.H. Puruboyo .....	41
BAB IV. PADA JAMAN KYMERDEKAAN .....	43
1. Pada awal Jaman Kemerdekaan .....	43
2. Aktif dalam Bidang Politik pada Jaman Orde Lama .....	55
3. Kegiatan pada Era Pembangunan .....	58
PENUTUP .....	63
DAFTAR CATATAN .....	65
DAFTAR INFORMAN .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN .....	69

## PENDAHULUAN

Ketika buku ini ditulis, bangsa Indonesia sudah melaksanakan rencana pembangunan lima tahun yang pertama dan yang kedua serta sedang melaksanakan rencana pembangunan lima tahun yang ketiga. Berkat pelaksanaan ketiga rencana pembangunan lima tahun itu kehidupan bangsa Indonesia mengalami peningkatan dalam segala bidang. Dalam bidang ekonomi pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia menjadi lebih tinggi. Dalam bidang pendidikan sudah banyak perguruan tinggi dan sekolah lanjutan atas yang didirikan serta ribuan sekolah lanjutan pertama dan sekolah dasar yang dibangun. Dalam bidang prasarana fisik, banyak jalan, jembatan, pelabuhan dan sebagainya yang dibuat atau diperbaiki. Dalam bidang agama tampak sekali bahwa rakyat Indonesia menjadi lebih giat dalam melaksanakan ibadah menurut aturan agama masing-masing. Dalam bidang-bidang lain juga tercapai kemajuan yang pesat. Hal itu semua telah memberi keyakinan kepada bangsa Indonesia bahwa hari depannya akan terus berkembang kearah yang lebih baik.

Tetapi, apa yang terjadi pada hari ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan kejadian hari kemarin. Demikian pula kejadian-kejadian yang dialami bangsa Indonesia pada waktu sekarang dengan hasil-hasilnya tidak dapat dipisahkan dengan kejadian-kejadian yang dialami bangsa Indonesia pada masa yang lalu. Kalau misalnya tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia tidak memproklamasikan kemerdekaan, dan kalau sesudah memproklamasikan kemerdekaan itu bangsa Indonesia tidak berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai, bangsa Indonesia tidak akan mempunyai kesempatan untuk melaksanakan pembangunan seperti yang sedang berlangsung sekarang ini. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 itupun bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Proklamasi kemerdekaan itu adalah hasil diskusi atau hasil penggodokan yang dilakukan oleh para pemimpin

Indonesia anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945. Begitu pula PPKI ini tidak muncul begitu saja. Badan yang terbentuk pada jaman penjajahan Jepang itu merupakan kelanjutan badan lain yang terbentuk pada jaman penjajahan Jepang pula yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kedua badan tersebut telah memainkan peranan penting dalam rangka pembentukan Negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui BPUPKI telah merumuskan dasar negara, sedang PPKI telah menetapkan undang-undang dasar (termasuk dasar negara yang tercantum dalam Pendahuluan), dan telah memilih Presiden dan wakil presiden.

Mengingat pentingnya BPUPKI dan PPKI dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia, dan mengingat pula bahwa berbicara mengenai dua badan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai para anggotanya, maka dipandang perlu adanya penulisan mengenai biografi para anggotanya. Dalam hubungan inilah maka dipandang perlu untuk menulis biografi salah seorang tokoh yang pada jaman Jepang berfungsi sebagai anggota BPUPKI dan kemudian juga anggota PPKI. Tokoh yang dimaksud ialah Gusti Pangeran Puruboyo, seorang bangsawan tinggi dalam lingkungan Kraton Kasultanan Yogyakarta.

Tetapi menulis biografi Gusti Pangeran Puruboyo bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab sampai saat ini buku ini ditulis belum pernah ada tulisan mengenai biografi beliau baik berupa buku maupun berupa artikel dalam surat kabar. Kesukaran yang lain disebabkan oleh kenyataan bahwa meskipun beliau masih hidup dan dapat diwawancarai, tetapi karena beliau mempunyai sifat pendiam dan sama sekali tidak suka menonjolkan diri maka data-data yang cenderung kepada pengagungan nama beliau tidak dapat diungkap dengan mudah. Kecuali itu status beliau sebagai bangsawan tinggi kraton dan kegiatan beliau yang lebih banyak dalam organisasi intern kraton menyebabkan pihak-pihak lain termasuk para bangsawan sendiri tidak banyak mengetahui mengenai hal-hal beliau.

Meskipun demikian data yang dipergunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan buku ini terutama diperoleh oleh penulis dari wawancara dengan :

- a. G.P. Puruboyo sendiri.
- b. K.P.H. Tirtodiningrat, seorang tokoh yang pernah menjadi bupati di Gunung Kidul dan pernah menjadi pegawai tinggi pada Kantor Kependudukan (Kantor Provinsi) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. K.P.H. Purwokusumo, SH. seorang tokoh pensiunan wali kota Kotamadya Yogyakarta.
- d. G.B.P.H. Prabuningrat, seorang tokoh yang sampai waktu buku ini ditulis masih berkedudukan sebagai rektor Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.
- e. R.W. Kusumobroto, seorang tokoh pensiunan kepala Inspeksi Daerah Kebudayaan (IDAKEB) Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. R.M. Moh. Asrar, seorang tokoh politik dan sekarang berkedudukan sebagai sekretaris organisasi persatuan perintis kemerdekaan cabang Yogyakarta.
- g. R.M. Sudomo, BA. purnawirawan ABRI.
- h. Sudrasman, seorang tokoh politik yang pernah berada dalam satu seksi dalam Parlemen R.I. dengan G.P Puruboyo.

Kemudian agar data yang didapat dari wawancara itu dapat dijadikan ceritera yang tidak terlalu kering, oleh penulis diolah bersama-sama dengan data yang didapat dari buku-buku dan ber-sumber lain.

Adapun garis besar biografi G.P. Puruboyo dapat dituturkan sebagai berikut :

G.P. Puruboyo dilahirkan pada tahun 1906 di kraton Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1910 beliau mulai dipondokkan di Loji Kecil Utara dan mulai bersekolah di taman kanak-kanak. Mulai tahun 1913 sampai tahun 1919 beliau belajar ke Europesche Lagere School. Tahun 1919 putera Sri Sultan Hamengku Buwono VIII itu pindah ke Negeri

Belanda. Di Negeri Belanda beliau belajar di lagere school (1919 - 1920), Hogere Burgerschool (1920 - 1925), dan Technische Hoogeschool di Delft (1925 - 1928). Pada tahun 1928 G.P. Puruboyo kembali ke tanah air dan pada tahun 1930 mulai belajar lagi di Rechts Hooeschool Batavia (1930 - 1933).

Pada tahun 1933 - 1942 G.P. Puruboyo menjadi pengageng Parentah Luhur Kraton. Pada tahun 1942 Parentah Luhur Kraton diubah namanya menjadi Kawedanan Kori. Pada tahun 1969 sampai saat buku ini ditulis G.P. Puruboyo menjadi pengageng pada tiga instansi dalam Kasultanan Yogyakarta yaitu Tepas Dworopuro, Kawedanan Ageng Widyobudoyo, dan Tepas Pariwisata.

Pada tahun 1948 - 1959 G.P. Puruboyo menjadi anggota Dewan Pimpinan Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR). Pada tahun 1956 - 1959 menjadi anggota Parlemen R.I. sebagai wakil partai PIR. Pada tahun 1971 - 1977 menjadi anggota DPR R.I. sebagai wakil Golongan Karya (Golkar). Pada tahun 1977 sampai saat buku ini ditulis masih anggota MPR sebagai wakil Golkar.

Perlu diterangkan di sini bahwa sesuai dengan peraturan di Kasultanan Yogyakarta di mana seorang bangsawan dapat berubah-ubah namanya karena perubahan statusnya, G.P. Puruboyo mula-mula bernama B.R.M. Sungangussamsi (1906 - 1939), lalu bernama B.P.H. Puruboyo (1939 - 1980), dan sekarang bernama G.P. Puruboyo.

Kecuali itu perlu diutarakan pula bahwa dalam buku ini semua nama ditulis dengan EYD, dan ejaan Latin Jawa diganti dengan ejaan Latin Indonesia, sehingga Dwarapura ditulis Dworopuro dan Tepas Priwisata ditulis Tepas Pariwisata.

## BAB I.

### SILSILAH G.P. PURUBOYO

(B R.M. Sungangussamsi)

G.P. Puruboyo (B.R.M. Sungangussamsi) adalah putera Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, dari Kesultanan Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengku Buwono VIII mempunyai nama kecil Gusti Raden Mas Sujadi, lahir pada hari Rabu tanggal 3 Maret 1880, naik tahta pada hari Selasa tanggal 8 Februari 1921, mangkat pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 1939, dimakamkan di Pasareyan Pajimatan Imogiri Kadhaton Saptorenggo. Beliau mempunyai seorang permaisuri bernama Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegoro dan tujuh orang isteri (yang dalam bahasa Jawa disebut selir), yaitu :

1. Bendoro Raden Ayu Pujoningdiah.
2. Bendoro Raden Ayu Puspitaningdiah.
3. Bendoro Raden Ayu Srengkorohadiningdiah.
4. Bendoro Raden Ayu Rukmihadiningdiah.
5. Kanjeng Bendoro Raden Ayu Retnohadiningrum.
6. Bendoro Raden Ayu Retnopuspito.
7. Bendoro Raden Ayu Tejaningrum.

Adapun putera dan puteri Sri Sultan Hamengku Buwono berjumlah 41 orang, yang secara berturut-turut menurut usianya adalah sebagai berikut :

1. Bendoro Raden Ajeng Gusti Siti Sundarumiyah kemudian bernama Kangjeng Ratu Pembayun, dikawin dengan Bendoro Pangeran Haryo Pakuningrat, putera dari Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro, disebut Kangjeng Gusti Putro. Ia dilahirkan oleh Bendoro Ayu Pujoningdiah.
2. Bendoro Raden Mas, Seda timur. Ia dilahirkan oleh Raden Ayu Pujoningdiah.
3. Bendoro Raden Ajeng Siti Sayadi, dikawinkan dengan

- Kangjeng Raden Tumenggung Sindurejo, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Sindurejo. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Puspitoningdiah.
4. Bendoro Raden Ajeng Siti Sadari, dikawinkan dengan Kangjeng Raden Tumenggung Purbowinoto, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Purbowinoto. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Puspitoningdiah.
  5. Bendoro Raden Mas Mustari, Seda timur. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Puspitoningdiah.
  6. Bendoro Raden Ajeng Siti Kadarmi, diterimakan Kanjeng Raden Tumenggung Jayaningrat, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Jayaningrat. Ia dilahirkan oleh Raden Ayu Pujoningdiah.
  7. Bendoro Raden Mas Yartobitu, kemudian bernama Gusti Pangeran Hangabei. Ia dilahirkan oleh Raden Ayu Puspitoningdiah.
  8. Bendoro Raden Mas Sungangussamsi, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Puruboyo. Ia dilahirkan oleh Raden Ayu Srenkorohadiningdiah.
  9. Bendoro Raden Mas Sumeru, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Danupoyo. Ia dilahirkan oleh Raden Ayu Puspitoningdiah.
  10. Bendoro Raden Mas Sudiarso, Sedo timur. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Pujoningdiah.
  11. Bendoro Raden Ajeng Siti Kajananywo, dikawinkan dengan Kangjeng Raden Tumenggung Joyowinoto, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Joyowinoto. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Srengkorohadiningdiah.
  12. Bendoro Raden Ajeng Siti Mutosangilun, Seda timur. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Srengkorohadiningdiah.
  13. Bendoro Raden Mas Kartolo, kemudian bernama

- Bendoro Pangeran Haryo Mangkuningrat. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Pujoningdiah.
14. Bendoro Raden Mas Tinggarto, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Prabuningrat. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Puspitoningdiah.
  15. Bendoro Raden Ajeng Siti Nurywadinah, dikawinkan dengan Kangjeng Raden Tumenggung Condroningrat, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Condroningrat. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Srengkorohadiningdiah.
  16. Gusti Raden Mas Dorajatun, kemudian menjadi Raja bergelar Ngarsadalem Sampeyandalem Hingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono IX Ngayogyakarta. Ia dilahirkan oleh Kangjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegoro, disebut juga Kangjeng Alit.
  17. Bendoro Raden Ajeng Siti Kuswanayi, dikawinkan dengan Bendoro Pangeran Haryo Cokrodingrat, putera Sampeyandalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro disebut dengan nama Kangjeng Gusti Putro, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Cokrodingrat. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Rukmihadiningdiah.
  18. Bendoro Raden Ajeng Siti Sriwayati, dikawinkan dengan Kangjeng Raden Tumenggung Purboseputro, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Purboseputro, cerai. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Srengkorohadiningdiah.
  19. Bendoro Raden Ajeng Siti Swandari, dikawinkan dengan Kangjeng Raden Tumenggung Purwodiningrat, kemudian bernama Raden Ayu Purwodiningrat. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Puspitoningdiah.
  20. Bendoro Raden Mas Duryatnahnu, Seda Timur.

- Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Pujoningdiah.
21. Bendoro Raden Mas Mohikyaun, kemudian bernama Bendoro Pangeran Harya Surtowijoyo. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Rukmihadiningdiah.
  22. Bendoro Raden Mas Raisulngaskari, kemudian bernama Pangeran Haryo Bintoro. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Srengkorohadiningdiah.
  23. Bendoro Raden Mas Alposuatlamin, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Suryobrongto. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Pujoningdiah.
  24. Bendoro Raden Ajeng Siti Hilalulngasarati, dikawinkan dengan Kangjeng Raden Tumenggung Kusumodiningrat, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Kusumodiningrat. Ia dilahirkan oleh Puspitoningdiah.
  25. Bendoro Raden Mas Mupasalukatini, Seda timur. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Puspitoningdiah.
  26. Bendoro Raden Mas Iaulkirani, kemudian bernama Bendoro Pengeran Haryo Murdaningrat. Ia dilahirkan oleh Raden Ayu Srengkorohadiningdiah.
  27. Bendoro Raden Mas Makunulmunojati, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Pujokusumo. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Pujodingdiah.
  28. Bendoro Raden Mas Pelulukuluki, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Suryoputro. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Retnoningrum.
  29. Bendoro Raden Ajeng Siti Sutiyanti dikawinkan dengan Ir. R. Puspoharsono Jayaningrat, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Puspoharsono Jayaningrat. Ia dilahirkan oleh Kangjeng Bendoro Raden Ayu Retnohadiningrum.
  30. Bendoro Raden Mas Sunwoto, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Hadiwijoyo. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Retnopuspito.
  31. Bendoro Raden Ajeng Siti Pandansari, dikawinkan

- dengan R. Sumarman S.H., kemudian bernama Raden Ayu Sumarman. Ia dilahirkan oleh Kangjeng Bendoro Raden Ayu Retnohadiningrum.
32. Bendoro Raden Mas Sahadatsatir, Seda timur. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Retnopuspito.
  33. Bendoro Raden Mas Hening, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Yudonegoro. Ia dilahirkan oleh Kangjeng Bendoro Raden Ayu Retnohadiningrum.
  34. Bendoro Raden Mas Dr. Bonokamsi, kemudian dengan nama Bendoro Pangeran Haryo Dr. Dipoyono. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Tejaningrum.
  35. Bendoro Raden Ajeng Wahyorini, Seda timur. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Retnopuspito.
  36. Bendoro Raden Mas Satriyo, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Benowo. Ia dilahirkan oleh Kangjeng Bendoro Raden Ayu Retnohadiningrum.
  37. Bendoro Raden Ajeng Siti Prayuti, Seda timur. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Retnopuspito.
  38. Bendoro Raden Ajeng Siti Widyastuti, dikawinkan dengan R. Suwarno Handayaniingrat, kemudian bernama Bendoro Raden Ayu Suwarno Handayaniingrat. Ia dilahirkan oleh Kangjeng Bendoro Raden Ayu Retnohadiningrum.
  39. Bendoro Raden Ajeng Sutarnin, Seda timur. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Retnopuspito.
  40. Bendoro Raden Mas Danangjoyo. Ia dilahirkan oleh Kangjeng Bendoro Raden Ayu Retnohadiningrum.
  41. Bendoro Raden Mas Drs. Robinharyani, kemudian bernama Bendoro Pangeran Haryo Drs. Puger. Ia dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Retnopuspito. 1)
- Dari silsilah seperti tersebut di atas jelaslah bahwa di antara putera dan puteri Sri Sultan Hamengku Buwono VIII, G.P. Puruboyo \*(yang juga bernama B.R.M. Sungagussamsi)

\*) didalam uraian selanjutnya nama yang digunakan ialah G.P. Puruboyo.

menduduki tempat ke 8 dilihat dari segi usia. Kecuali itu dari silsilah di atas kita dapat mengetahui pula bahwa G.P. Puruboyo dilahirkan oleh Bendoro Raden Ayu Srengkorohadiningdiah dan mempunyai enam saudara sekandung yaitu :

1. Gusti Bendoro Raden Ayu Joyowinoto.
2. Gusti Bendoro Raden Ajeng Mutosangilun.
3. Gusti Bendoro Raden Ayu Condrodiningrat.
4. Gusti Bendoro Raden Ayu Purboseputro.
5. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Bintoro.
6. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Murdaningrat.

Dalam bulan Februari 1939 Puruboyo menikah dengan Raden Ajeng Mardusari, puteri Gusti Pangeran Tejokusumo, atas pilihan sendiri. Pada waktu itu memang sudah ada kebiasaan para putera Sri Sultan diberi kesempatan untuk memilih sendiri calon isterinya. Tetapi kebiasaan yang sedemikian itu tidak berlaku bagi para puteri Sri Sultan. Raden Ajeng Mardusari adalah saudara sepupu G.P. Puruboyo, sebab ayahanda beliau yaitu G.P. Tejokusumo adalah saudara seayah Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Isteri G.P. Puruboyo yang pertama itu dilahirkan pada tahun 1908 dan wafat pada tahun 1964 dengan meninggalkan dua orang putera yaitu R.M. Damar-sari dan R.M. Sudarpadi. R.M. Damarsai yang bekerja pada Dinas P & K DIY, dilahirkan pada tanggal 5 Desember 1939, mempunyai enam orang putera yaitu : R.M. Tejopurnomo, R.M. Wirasongko, R.M. Darmokusumo, R.M. Danardono, R.M. Wijanarko, dan R.M. Suhatmaji. R.M. Sudarpadi bekerja pada Kantor Sensus/Statistik D.I.Y., dilahirkan pada tanggal 11 Oktober 1943, mempunyai tiga orang putera yaitu R.M. Condroyono, R.M. Martengsoro dan R.M. Tridaryanto. 2)

Demikianlah gambaran tentang silsilah G.P. Puruboyo beserta lingkungan keluarganya.

## BAB II

### PADA JAMAN PENJAJAHAN BELANDA

#### 1. Pengalaman Masa Kecil.

G.P. Puruboyo dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 1906 di Dalem Suryobrantan dalam lingkungan Kraton Kasultanan Yogyakarta dengan nama B.R.M. Sungangusamsi. Sejak lahir sampai kira-kira berusia dua tahun beliau tinggal di Dalem Suryobrantan.

Tetapi ketika ayahanda beliau akan kawin, beliau pindah ke Sompilan (dalem Pakuningratan sekarang) sampai usia 4 tahun. Setelah usia 4 tahun bersama dengan dua orang saudaranya (G.P. Hangabehi dan G.B.P.H. Danuupoyo) dan para putera G.B.P.H. Suryodiningrat dipondokkan di Lojikecil Utara (sekarang tempat bis "Baker") pada keluarga Belanda, nona Van Weerden. Nona Van Weerden ini guru taman kanak-kanak (di gedung D.P.R.D. sekarang) dan seorang indo yang keras sifatnya. Sebelum putera pangeran dipondokkan, setiap pergi ke sekolah selalu diikuti hamba sahayanya dan inang pengasuhnya (Jawa-emban). Kecuali itu putera/puteri pangeran/Sri Sultan kalau masuk sekolah pasti memakai gelang emas yang berat. Maka ketika dipondokkan kedua hal tersebut dilarang. Larangan memakai perhiasan itu demi keamanan. Semula G.P. Puruboyo bersekolah di taman kanak-kanak (gedung D.P.R.D.) lalu pindah ke taman kanak-kanak yang berada di belakang SMP II sekarang selama di taman kanak-kanak Jl. Malioboro (gedung D.P.R.D.) beliau pulang pergi naik kereta kuda, tetapi setelah pindah, kalau pergi dan pulang dari sekolah berjalan kaki saja, karena dekat dengan kediamannya yang baru itu.

Selama berdiam di rumah nona Van Weerden, para putera bangsawan itu mendapat pendidikan yang baik. Setiap hari, sepulang sekolah, kira-kira pukul 02.00 mengerjakan pekerjaan rumah, meliputi segala hal yang diajarkan di sekolah, misalnya berhitung di bawah pengawasan kemenakan nona Van Weerden. Kecuali itu setiap hari mereka harus berbahasa Belanda sehingga

mereka fasih berbahasa Belanda. Biarpun masih duduk di taman kanak-kanak, mereka juga diberi les membaca dan menulis sesuai dengan pelajaran di sekolah. Setiap sore tempat Van Weerden memang dipergunakan untuk memberi les bagi anak laki-laki dan perempuan. Kebanyakan yang mengambil les anak anak Cina.

Setiap anak yang berdiam di rumah nona Van Weerden diberi nama Belanda, demikian pula G.P. Puruboyo dan saudara saudaranya, misalnya : G.P. Hangabehi - Piet, G.P. Puruboyo - Eddy, GBPH. Danupoyo - Dikky.

Selama berada di asrama para putera dari keluarga kraton itu hanya mendapat pelajaran-pelajaran tambahan tetapi suatu ketika mereka disuruh kerja bakti membersihkan halaman.

Ketika G.P. Puruboyo berumur 7 tahun (tahun 1913) telah memasuki sekolah Eerste Europesche Lagere School (ELS) yaitu di SMP II sekarang. Sekolah ini setingkat dengan sekolah dasar jaman sekarang, tetapi kelasnya sampai 7. Di Yogya terdapat tiga jenis E.L.S., yaitu E.L.S. I berada di SMP II sekarang, E.L.S. II tempatnya sebelah barat E.L.S. II, sedang E.L.S. III di Bintaran. Di antara ketiga E.L.S. ini yang di anggap paling baik ialah E.L.S. I ini dan murid-murid setiap bulan mendapat rapor.

Yang diajarkan di E.L.S. ialah antara lain adalah berhitung, ilmu bumi, sejarah, membaca dan gramatika bahasa Belanda serta menulis halus. Perlu diketahui bahwa setiap kelas dipegang oleh seorang guru. Selama G.P. Puruboyo bersekolah di ELS I itu sekolah ini mengalami pergantian kepala sekolah tiga kali. Bersamaan dengan masuknya beliau ke E.L.S. I yang menjadi kepala sekolah ialah tuan Tendeling. Ketika kelas II diganti tuan Mulder, kemudian diganti Ribbink, dan terakhir tuan Priester. Di antara kepala sekolah tersebut yang paling keras ialah Ribbink, sedang yang suka bercanda ialah Mulder.

G.P. Puruboyo belajar di E.L.S. I Yogyakarta sampai kelas VII; tetapi di kelas ini baru dijalaninya sebulan, jadi belum tamat, ia terpaksa meninggalkan sekolah tersebut karena harus mengikuti ayahandanya (yang pada waktu itu sudah menjadi

putera mahkota) untuk belajar di Nederland. Hal itu terjadi pada tahun 1919. 1)

## **2. Di Negeri Belanda.**

G.P. Puruboyo menetap di negeri Belanda dari tahun 1919 sampai dengan 1922. Pada tahun 1919 ia keluar dari ELS Yogyakarta, karena diajak oleh ayahandanya ke negeri Belanda untuk melanjutkan pelajaran disana. Selain G.P. Puruboyo, juga R.M. Basuki (putra patih Danurejo ke VII) dan seorang pamannya B.R.M. Subono (putra H.B. ke VII) diajak ke negeri Belanda. Sesampainya di negeri Belanda ia dipondokkan pada Ir. Van Mourik Broekman, seorang direktur H.B.S., di Haarlem (sebelah barat Amsterdam), sedang ayahandanya menetap di Den Haag untuk memperluas pengetahuan.

Ketika calon Sultan itu kembali B.R.M. Subono turut serta karena tidak kerasan, sedang G.P. Puruboyo dan R.M. Basuki tetap di negeri Belanda. Sepulang dari negeri Belanda ayahnya yang memang calon sultan, diangkat menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono ke VIII menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono ke VII, yang telah lanjut usia dan menetap di Amburukmo sampai wafatnya.

Di negeri Belanda, G.P. Puruboyo melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar atau lagere school, kelas VI, di Haarlem. Pelajaran di lagere school sama dengan di sekolah-sekolah Belanda di Indonesia. Hal ini sesuai dengan politik Belanda, agar pendidikan di sekolah-sekolah Belanda di Indonesia disamakan dengan pendidikan di sekolah-sekolah di negeri Belanda supaya anak-anak ambtenaar (pegawai) yang tinggal di Hindia Belanda tidak ketinggalan dalam pelajaran mereka.

Pada permulaan menetap di negeri Belanda G.P. Puruboyo mendapat pengalaman yang lucu. Pada suatu hari beliau dan R.M. Basuki berjalan-jalan di kota Haarlem. Di belakangnya ikutlah sederetan anak-anak Belanda. Anak-anak Belanda itu kelihatan keheran-heranan melihat dua anak yang warnanya berbeda dengan warna kulit mereka sendiri. Di antara

mereka itu ada yang lalu bertanya : "Apakah kalian belum mandi?" Mungkin yang menyebabkan mereka bertanya demikian itu ialah karena mereka melihat kulit dua orang anak Indonesia itu lebih hitam dari pada kulit mereka sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang menyangka bahwa keduanya adalah bangsa Cina, karena mereka belum mengetahui perbedaan antara bangsa Cina dan bangsa Indonesia.

G.P. Puruboyo termasuk murid yang pandai di sekolah, raportnya selalu baik, sehingga untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu ke H.B.S. (Hogere Burger School) beliau tidak usah turut ujian tetapi langsung diterima di tingkat sekolah; sekolahnya juga di Haarlem, sedang kepala sekolahnya adalah Ir. Van Mourik Broekman. Lama belajar di H.B.S. 5 tahun, dan ia masuk dari tahun 1920 sampai tahun 1925. Selama di H.B.S. tiap hari masuk sekolah pukul 07.30 - 12.00 dan pukul 13.30 - 15.30, tetapi pada hari Rabu dan Sabtu masuk pagi saja.

Kepala sekolah dan guru-guru H.B.S. itu sangat baik, selalu memperhatikan kesejahteraan para murid, misalnya : setiap minggu sekali kepada para murid diberikan pelajaran olah raga pada sore hari selama 2 jam (pukul 13.30 - 15.30); karena kalau musim winter pukul 16.00 sore udara dingin dan cuaca gelap. Pada musim panas, setiap tahun, sebelum kenaikan kelas para murid diajak olah raga dengan naik sepeda dengan jarak + 8 km. Sesampai di tempat yang dituju para murid diajak berolah raga; ada yang sepak bola, ada yang bola kranjang, dan lain-lain. Pada waktu itu para murid disuruh membawa bekal sendiri-sendiri; biasanya berupa roti dan minuman.

Di H.B.S. tiap pelajaran tentu ada "P.R." (pekerjaan rumah)-nya. Tetapi ada instruksi dari direktur, agar setiap hari "P.R." yang diberikan kepada murid yang paling banyak hanya meliputi tiga mata pelajaran saja supaya para murid dapat mengerjakan setiap "P.R." yang diberikan itu. Di H.B.S. diberikan pelajaran ilmu ukur, aljabar, kimia, fisika, biologi, dan empat macam bahasa yaitu bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Perancis. Dalam pelajaran biologi

guru yang bersangkutan kadang-kadang mengadakan praktek dengan jalan membawa para murid ke pantai untuk melihat burung-burung yang sedang membuat sarangnya. Adapun keempat bahasa yang sudah disebutkan di atas semuanya menjadi bahan dalam ujian penghabisan dalam rangka evaluasi belajar tahap akhir.

Ketika itu semua guru di H.B.S. dianggap oleh G.P. Puruboyo biasa saja. Hanya ada seorang guru yang mengajar bahasa Belanda dari klas I sampai klas V, bernama Dr. Greiner, yang dianggap luar biasa karena kecuali sangat pandai juga sangat pelit untuk memberi nilai. Selama ia diajar guru ini belum pernah mendapat nilai lebih dari 5. Tetapi aneh, pada ujian penghabisan G.P. Puruboyo mendapat nilai 10. Menurut G.P. Puruboyo nilai ujian penghabisan pada sekolah-sekolah menengah di negeri Belanda tidak seimbang dengan nilai ujian penghabisan di H.B.S. Indonesia. Di negeri Belanda untuk mendapat nilai baik, terutama dari keempat bahasa yang disebutkan di atas sangat sukar.

Selama di H.B.S. G.P. Puruboyo tidak mempunyai kawan karib, hanya putera Van Mourik Broekman yang menjadi teman dekatnya dari klas I sampai klas V. Dengan anak induk semangnya itu ia hanya berbeda ruang. Misalnya : teman itu di klas Ic, tetapi beliau di klas Id. Dalam bidang olah raga beliau menyenangi sepak bola. Maka dari itu ketika di H.B.S. klas I beliau dan teman-temannya sekediaman, termasuk putera Van Mourik Brockman, masuk menjadi anggota organisasi persepakbolaan sekolah. Dalam kesebelasan ini beliau menjadi kanan luar, kanan dalam dan kadang-kadang poros halang. Kesebelasan ini sering mengadakan kompetisi antar sekolah menengah untuk berebut piala. Selain menjadi anggota kesebelasan sekolah, beliau juga menjadi anggota kesebelasan luar sekolah yaitu H.F.C. (Haarlem Foot-ball Club) dan merupakan anggota amatir. Karena anggota H.F.C. itu sangat banyak, maka H.F.C. dibagi menjadi sembilan kesebelasan, dan beliau termasuk kesebelasan yang ke 6. Kesebelasan H.F.C. sering mengadakan pertandingan dengan

organisasi persepakbolaan yang lain misalnya : R.C.H. (Racine Club Haarlem), E.D.O., dan Haarlem. Selain beliau masuk anggota organisasi persepakbolaan juga masuk menjadi anggota perkumpulan hocky dan tenis.

Di Haarlem terdapat dua H.B.S. yaitu H.B.S. I dan H.B.S. II di Haarlem Utara. Beliau belajar di H.B.S. I Haarlem Selatan. Pelajar di kedua sekolah ini campuran, artinya di situ terdapat pelajar putera dan terdapat pula pelajar puteri. Di sini ada juga yang khusus untuk wanita yaitu Gymnasium. Sekolah ini sederajat dengan H.B.S., juga diberi pelajaran bahasa Latin dan Yunani, tetapi yang sudah tamat dari sekolah itu tidak dapat masuk ke sekolah tinggi kelompok eksakta karena pelajaran eksaktanya diperkecil, sedang tamatan H.B.S. dapat melanjutkan ke sekolah tinggi teknik, sekolah tinggi perdagangan, dan sekolah tinggi pertanian. Kebanyakan murid-murid H.B.S. II (Haarlem Utara) menjadi anggota kesebelasan persepak-bolaan Haarlem. Kedua kesebelasan ini merupakan kesebelasan amatiran.

Hubungan di antara murid-murid H.B.S. I dan H.B.S. II dapat dikatakan tidak baik. Di antara kedua belah pihak sering terjadi perkelahian. Dalam musim salju biasanya mereka saling melempar dengan salju.

Setamat dari H.B.S. G.P. Puruboyo melanjutkan ke Technische Hoge School (T.H.), jurusan Sipil, di Delft. Setelah diterima di T.H. lalu diplonco selama 2½ minggu. Anehnya di sini perploncoannya tidak boleh di muka umum, tetapi harus di dalam gedung.

Perlu diketahui bahwa di dalam setiap perguruan tinggi di negeri Belanda ada suatu organisasi yang disebut korps. Korps ini hanya untuk anggota elite, karena untuk masuk menjadi anggotanya harus membayar iuran 25 gulden. Korps mempunyai tempat rekreasi dan perpustakaan yang baik. Selama di T.H. ia menjadi anggota korps (tetapi tidak aktif), anggota organisasi olahraga (sepak bola, hocky dan tenis), anggota organisasi tonil; juga menjadi anggota organisasi debat. Dalam

tonil beliau pernah menjadi piccolo (kacung hotel) dan dalam debat beliau hanya dua kali hadir. Debatingselub tersebut sering mendatangkan orang-orang politik, misalnya Tuan Deterding, seorang yang terkenal waktu itu.

Mahasiswa T.H. hanya sedikit. Mereka sering berdansa sampai pagi pukul 03.00 dan mereka biasanya membawa pasangan dari luar. B.R.M. Sungangussamsi juga menyukai dancing.

Selama di T.H. beliau melihat sikap mahasiswa totok terhadap mahasiswa indo dan terhadap mahasiswa Indonesia di sana. Yang totok sangat benci pada yang indo tetapi terhadap mahasiswa Indonesia sangat baik. Mereka mengajak G.P. Puruboyo masuk menjadi club mereka. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa mahasiswa Indonesia yang belajar di sana adalah bangsa asing. Perlu diketahui bahwa setiap tahun mahasiswa yang menjadi anggota korps diwajibkan membentuk club-club. Setiap club beranggotakan 12 - 14 orang. Pelajar Belanda yang totok-totok ber club sendiri, tidak bercampur dengan club indo-indo. Tetapi meskipun pelajar-pelajar totok itu benci sekali kepada pelajar indo, mereka (para indo) banyak yang berjasa terhadap korps, karena banyak yang pandai dalam bidang olah raga, misalnya : mendayung dan sepak bola. Maka dari itu pelajar-pelajar Belanda totok kadang-kadang mengajak para pelajar indo menjadi anggota team mereka. 2)

### **3. Kembali ke Indonesia.**

Sebelum lulus dari T.H. Delft, G.P. Puruboyo dipanggil ayahandanya Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Sesampai di Indonesia, ia belajar lagi di Rechts Hoge School (R.H.) di Batavia (1930 - 1933). Letak R.H. di jalan Merdeka Barat yaitu di Konings Plein West, dekat musium Gajah dan sekarang dipakai oleh Hankam. Selama belajar di R.H. ia menumpang pada keluarga Van Vianen, di jalan Raden Saleh berhadapan dengan Rumah Sakit Koningin Emma atau Rumah Sakit Cikini sekarang. Banyak saudara-saudara beliau yang bersekolah di

situ, misalnya : R.M. Badur, R.M. Mandoyokusumo (Jibu), R.M. Basuki, dan mahasiswa yang kemudian dikenal sebagai K.P.H. Prof. Kartonegoro, S.H. dan Prof. Mulyatno. G.P. Puruboyo mempunyai saudara setingkat, sedang adik tingkatnya yaitu K.R.T. Joyonegoro, Ali Budiarjo, S.H., dan Sudarsono (Menteri dalam negeri dalam Kabinet Syahrir). Ketika masih belajar di R.H. sudah terlihat di antara mereka yang ikut pergerakan ataupun yang tidak. G.P. Puruboyo belum turut pergerakan sedang yang sudah turut pergerakan di antaranya adalah R.M. Yusupadi dan R.M. Hino.

Pada waktu itu kalau mengikuti kuliah para mahasiswa harus berpakaian lengkap (berdasi dan berjas). Kalau hendak mengikuti kuliah naik sepeda. Perlu diketahui bahwa anak-anak Yogya yang berkuliah di R.H. kebanyakan berasrama di Gang Bluntas di rumah seorang janda tua. Selama kuliah di R.H. ia tidak aktif dalam bidang olah raga sepak bola, tetapi turut dalam olah raga tenis dan membentuk perkumpulan tenis. Pada masa itu ia pernah dibujuk oleh para mahasiswa yang hidup secara barat dan senang akan dansa-dansa, agar menjadi anggota perkumpulan mereka; tetapi ia hanya satu kali menghadiri acara yang diadakan oleh perkumpulan mereka. 3)

#### **4. Menjadi Pembesar dalam lingkungan Kraton Kasultanan Yogyakarta.**

Dalam pemerintahan Sri Sultan Hamangku Buwono VIII terdapat lima unsur pokok yaitu :

- a. Parentah Luhur Kraton.
- b. Komtabilitet Kraton.
- c. Kawedanan Keparak Para Gusti.
- d. Kas Kraton.
- e. Parentah Punakawan. 4)

Parentah Luhur Kraton bertugas mengurus surat-menyurat antar Sri Sultan dengan pihak luar, informasi dari pihak Kraton kepada pihak luar, undangan kepada pihak luar, majalah dan perpustakaan. Pegawai Parentah Luhur terbagi atas dua

bagian, bagian yang satu mendapat gaji dari Pemerintah Hindia Belanda, sedang bagian yang lain mendapat gaji dari Kraton dan disebut abdi dalem Parentah Luhur.

Komtabilitet Kraton bertugas melakukan kontrol terhadap keluar dan masuknya uang dari dan ke Kas Kraton. Semua cek dan tanda pembayaran tidak sah jika tanpa tanda tangan kepala Komtabilitet Kraton dengan demikian terdapat nama-nama semua pegawai Kraton dari semua bagian (afdeeling) dan nama-nama semua anggota keluarga Sri Sultan. Kalau ada perubahan-perubahan, misalnya ada pegawai Kraton yang pindah pekerjaan, keluar, atau meninggal harus dilaporkan kepada Komtabilitet Kraton.

Kawedanan Keparak Para Gusti merupakan abdi dalem putri atau abdi dalem keparak (pegawai wanita) yang tugasnya menjaga bangsal dan tratag Proboyekso, membersihkan bangsal dan tratag Proboyekso, menjaga pintu gerbang Keputren (keputerian), juga memberi sajian kepada pusaka-pusaka Kraton pada setiap hari Kamis malam dan pada setiap hari Senen Wage malam (menjelang hari Selasa Kliwon) dengan membakar kemenyan dan menaruh bunga-bunga. Kawedanan ini dipimpin oleh permaisuri, tetapi kalau permaisuri tidak ada, dipimpin oleh Kanjeng Bendoro (selir Sri Sultan). Unsur yang termasuk dalam kawedanan ini ialah Bedoyo putri yang terdiri dari 60 orang gadis dan yang tugasnya menari dan melayani puteri Sri Sultan di Keputren. Kecuali bedoyo putri masih ada Paman Ageng yang bertugas membuat sajian dan makanan. Pawon ini terdiri dari dua bagian, yaitu (a) Gebuli, terletak di sebelah barat Magangan, dikepalai Nyi Lurah Gebuli dan (b) Sokolanggan, di sebelah timur Magangan, dikepalai oleh Nyi Lurah Sokolanggan.

Kas Kraton bertugas menerima, menyimpan dan membayarkan uang.

Parentah Punakawan terdiri dari dua bagian yaitu :  
Parentah Punakawan Kedaton dan Parentah Punakawan Bedoyo.

Parentah Punakawan Kedaton terdiri dari beberapa kesatuan yaitu :

- a. Punakawan Putra, dengan nama depan Atmo, bertugas membersihkan istana.
- b. Punakawan Ordomas, dengan nama depan Mangku, bertugas mengurus surat Sultan yang ditujukan kepada Patih.
- c. Punakawan minuman, dengan nama depan Sastro, bertugas melayani para tamu Kraton.
- d. Punakawan patehan, dengan nama depan Reso, tugasnya membuat minuman.
- e. Punakawan Langenastro, bertugas membawa tombak prajurit Mantrijero.
- f. Punakawan Kursi, bertugas memelihara kursi, tikar dan sebagainya.
- g. Punakawan Polowijo dan Bagusani, untuk menambah kekeramatan Sri Sultan.
- h. Punakawan Selir, dengan tugas mengurus penerangan lampu.
- i. Punakawan Kaji, tugasnya memberi do'a.
- f. Punakawan Nyireplatu, memadamkan kebakaran dalam Kraton.
- k. Punakawan Miji Wadono Ageng, melayani para tamu pada waktu pisowanan dalam Kraton dan menjadi pembesar abdidalem punakawan.

Parentah Punakawan Kedaton ini berkantor di sebelah timur Kraton.

Parentah Punakawan Bedoyo terdiri dari lima kesatuan yaitu :

- a. Punakawan Bedoyo Ngindrakilo, bertugas melayani Sri Sultan setiap hari.
- b. Punakawan Bedoyo Purworetno, sebagai utusan.
- c. Punakawan Bedoyo Tanaman, menjaga pintu taman.
- d. Punakawan Bedoyo Puyuh, memelihara binatang

puyuh.

- e. Punakawan Bedoyo Miji Prentah, menjadi pembesar punakawan bedoyo.

Abdi dalem Punakawan Bedoyo mempunyai nama depan yang sama yaitu Atmo dan berkantor di sebelah barat Kraton.

Sejak dulu dalam menjalankan pemerintahan Sultan Yogyakarta dibantu oleh Nayoko Reh Jero dan Nayoko Reh Jobo.

Nayoko Reh Jero terdiri atas 4 kanayakan yaitu :

- a. Kanayakan Keparak Kiwo.
- b. Kanayakan Keparak Tengen.  
Kedua kanayakan tersebut bertugas mengurus yayasan, pekerjaan umum, dan pesuruh Sri Sultan.
- c. Kanayakan Gedong Kiwo.
- d. Kanayakan Gedong Tengen.  
Kedua kanayakan ini bertugas mengurus hasil dan keuangan Kraton.

Nayoko Reh Jobo juga terdiri dari 4 kanayakan yaitu :

- a. Kanayakan Sitisewu.
- b. Kanayakan Bumijo.  
Keduanya bertugas mengurus tanah.
- c. Kanayakan Penumping.
- d. Kanayakan Numbakanyar.  
Keduanya bertugas menjaga keamanan.

Kedelapan kanayakan ini dikepalai oleh Patih. Nayoko hanya memegang pemerintahan sipil dan mempunyai staf yaitu: bupati kliwon, panewu sepuh parentah, panewu, panewu gebayan, mantri, carik, penajungan. Nayoko Jero bertugas di dalam kota dan Kraton sedang Nayoko Jobo bertugas di luar kota dibantu oleh bupati tamping. Bupati kliwon merupakan wakil nayoko dalam rapat. Tugas nayoko ialah mengesahkan peraturan-peraturan.

Dalam pemerintahan Sri Sultan VIII Kanayakan itu masih ada, tetapi hanya namanya saja dan tugasnya hanya caos

(menginap satu malam di Kraton untuk menjaga keamanan Kraton). Setiap hari yang bertugas caos 20 orang, dan tiap orang setiap 9 hari sekali mendapat giliran caos.

Bupati patih kepatihan merupakan sekretaris patih (sekarang Sekwilda) dan Patih merupakan kepala eksekutif.

Urusan yang rutin dapat diputuskan oleh Patih, tetapi urusan yang tidak rutin harus dilaporkan dahulu kepada Sri Sultan, sehingga surat-surat dari Patih diterima oleh Parentah Luhur Kraton dan menjawab surat-surat itu juga Parentah Luhur Kraton. Perlu diketahui bahwa Patih memegang pemerintahan Kasultanan/negeri. Dalam pemerintahannya sehari-hari cukup dengan persetujuan Gubernur, tetapi dalam masalah yang prinsipial harus minta persetujuan Sri Sultan. Karena itu Patih hanya mempunyai kekuasaan di luar Kraton, jadi tidak mempunyai hak untuk memerintah abdi dalem Kraton yang tergabung dalam Punakawan.

Selain Patih ada Kawedanan Jekso dan Penghulu. Penghulu merupakan abdi dalem Kraton yang bertugas membaca do'a dalam semua upacara yang diadakan di Kraton, misalnya garebeg, perkawinan dan lain-lain, tetapi gajinya dari Kasultanan; sedang Jakso merupakan abdi dalem Kasultanan yang bertugas mengadili semua perkara yang menyangkut kerabat Kraton sampai cangah. 5)

Dalam pemerintahan Sri Sultan IX berlangsung reorganisasi pemerintahan Kraton dan membentuk Parentah Ageng Kraton dengan tugas mengawasi kantor-kantor yang berada di Kraton. Karena ada parentah Ageng Kraton, maka supaya tidak membingungkan orang luar, Parentah Luhur Kraton diganti namanya menjadi kawedanan Kori. Kantor ini bersifat otonom dan tidak diisi lagi maka Sri Sultan sendirilah yang memegang pemerintahan Kasultanan dan mulai saat itu Sri Sultan berkantor di Kapatihan (di luar Kraton). Kawedanan Kori turut pindah tetapi namanya diubah menjadi Tepas Dworoputro (Dworo = pintu gerbang, puro = istana) yang tugasnya mengurus surat-surat yang masuk/keluar Kraton. Hal ini berlangsung

sampai akhir jaman pemerintahan Jepang. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya Sri Sultan IX hanya menguasai Kraton saja, karena pemerintahan di luar Kraton telah diserahkan kepada pemerintahan Daerah. Demikian pula pengadilan Kraton, karena dianggap tidak pada tempatnya dalam satu pemerintahan (Republik Indonesia) ada dua pengadilan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sri Sultan bahwa daerah Pakualaman dan Kasultanan termasuk wilayah R.I. sehingga tidak tepat jika Kraton Kasultanan mempunyai pengadilan sendiri.

Dalam menjalankan pemerintahan Kraton Sri Sultan dibantu oleh tepas-tepas (masing-masing tepas dikepalai oleh seorang pengeran yang berpangkat bupati) dan oleh Kawedanan Ageng Punakawan.

ada delapan tepas yaitu :

- a. Parentah Ageng Kraton; tugasnya mengurus hal-hal ihwal abdi dalem.
- b. Rantam arto; bertugas mengurus anggaran belanja Kraton.
- c. Danartopuro; bertugas menyimpan uang.
- d. Halpitopuro; tugasnya mengurus pembelian kebutuhan Kraton.
- e. Raconopuro; tugasnya mengurus paraturan Kraton.
- f. Banjarwilopo; bertugas mengurus perpustakaan kraton.
- g. Wadudarmo; tugasnya mengurus dana Kraton.
- h. Dworopuro; bertugas mengurus hubungan dengan masyarakat di luar Kraton. 6)

Dahulu tepas itu disebut kondo (kanda), tetapi karena terasa kurang enak didengar jika diucapkan, maka lalu diganti menjadi tepas. Kata tepas berasal dari bahasa kawi dan artinya tempat untuk bekerja. (kantor).

Kawedanan Ageng Punakawan terdiri dari :

- a. Sriwandowo. Ini terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama mengurus hal ihwal para putera dan para puteri Sri Sultan melalui lurah mereka masing-masing;

ada empat orang lurah : seorang lurah mengepalai para putera angkatan tua, seorang lurah mengepalai para putera angkatan muda, seorang lurah mengepalai para puteri angkatan tua, dan seorang lagi lurah yang bertugas mengepalai para puteri angkatan muda. Bagian yang kedua mengurus surat-surat yang berkaitan dengan silsilah dan ini disebut Tepas Darah Dalem. Bagian ketiga bertugas mengurus makam Imogiri dan makam Kota Gede dan ini disebut Kawedanan Puroloyo.

- b. Guritopuro; merupakan Sekretariat pribadi Sri Sultan.
- c. Kridomardowo; bertugas mengurus kesenian Kraton.
- d. Puroyokoro; bertugas mengurus penerangan lampu dan menyimpan barang-barang Kraton.
- e. Purorakso; kawedanan ini bertugas dalam bidang keamanan dan pertahanan.
- f. Widyobudoyo; kawedanan ini bertugas dalam bidang pemeliharaan perpustakaan, menyusun sejarah dan menyelenggarakan upacara-upacara.
- g. Wahonokriyo; berkewajiban mengurus kendaraan-kendaraan, perbaikan bangunan-bangunan dan kebersihan Kraton.
- h. Keparak Para Gusti; berkewajiban membersihkan keputerian dan mengatur saji-sajian. 7)

Sejak tahun 1933 sampai 1942 G.P. Puruboyo menjadi Pengageng (kepala) Parentah Luhur Kraton. Pada tahun 1942, karena Parentah Luhur Kraton diganti namanya menjadi Kawedanan Kori, maka G.P. Puruboyo menjadi Pengageng Parentah Luhur Kraton maupun menjadi Pengageng Kawedanan Kori, dengan sifat yang tenang, pendiam, tetapi ramah, sopan dan rajin, senantiasa dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan dengan sebaik-sebaiknya.

Sampai tahun 1942, yaitu sampai saat dimulainya pemerintahan pendudukan Jepang di Pulau Jawa, G.P. Puruboyo tidak pernah aktif dalam politik dan tidak pernah terlibat dalam

masalah politik apapun. Hal itu disebabkan oleh kedudukan beliau yang sangat sulit sebagai pangeran. Sebagaimana kita ketahui, pada jaman penjajahan Belanda para para raja (bumi-putra) dan keluarga mereka diawasi oleh aparaturn pemerintahan Belanda, khususnya oleh para polisi P.I.D. Kalau sampai kedatangan salah seorang dari anggota istana terlibat dalam politik, apa lagi jika politik yang terlibat itu diduga amat merugikan pihak pemerintah kolonial, raja yang bersangkutan pasti dimintai pertanggung jawaban.

Sebagai contoh dapat dituturkan di sini sebuah peristiwa yang dialami sendiri oleh G.P. Puruboyo. Pada suatu hari kira-kira dalam tahun 1934 G.P. Puruboyo menghadiri pembukaan sebuah kongres wanita di pendopo Taman Siswo sebagai wakil Sri Sultan Hamengku Buwono VIII. Dalam sebuah acara pembukaan kongres para hadirin diminta berdiri oleh pihak pimpinan untuk menghormati lagu "Indonesia Raya" yang akan/sedang dinyanyikan. Pada waktu itu G.P. Puruboyo merasa sangat kikuk, sebab sebagai orang Indonesia beliau ingin turut menyanyi, tetapi sebagai anggota keluarga istana beliau pasti akan mendapat akibat yang tidak baik jika tampak bersimpati terhadap lagu yang menggemakan tujuan perjuangan kebangsaan tersebut. Tetapi sebagai tamu yang tahu sopan santun ia berdiri juga memenuhi permintaan pemimpin pertemuan. Hal itu ternyata berakibat tidak baik. Meskipun segera sesudah lagu "Indonesia Raya" dinyanyikan ia pulang, namun keesokan harinya ia mendapat panggilan dari Gubernur untuk mempertanggung jawabkan kehadiran beliau dalam pembukaan kongres wanita itu. Untunglah, di muka Gubernur ia dapat memberi keterangan-keterangan yang tepat, sehingga dapat lolos dari jeratan pemerintah kolonial pada waktu itu. 8)

### **BAB III**

#### **PADA JAMAN PENJAJAHAN JEPANG**

##### **1. Pemerintah Pendudukan Jepang.**

Setelah berhasil menduduki Indonesia, mula-mula Jepang mengadakan pemerintahan pendudukan militer sementara di pulau Jawa. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 1 pasal 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenam belas pada tanggal 7 Maret 1942 yang di antaranya berbunyi sebagai berikut : "Bala Tentara Nippon melangsungkan pemerintahan militer untuk sementara waktu di daerah yang ditempatinya agar supaya mendatangkan sentausa dengan segera". Tugas memulihkan ketertiban dan dan keamanan serta menanamkan kekuasaan yang sementara lowong itu diserahkan kepada suatu pemerintahan militer yang disebut gunseibu. Gunseibu yang meliputi Jawa Barat berpusat di Bandung; gunseibu yang meliputi Jawa Tengah berpusat di Semarang dan gunseibu yang meliputi Jawa Timur berpusat di Surabaya. Di samping itu dibentuk dua daerah Istimewa yaitu Daerah Istimewa Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masing-masing gunseibu didukung oleh para komandan setempat yang kecuali bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan juga memecat para pegawai bangsa Belanda serta membentuk pemerintahan setempat. Tetapi usaha untuk membentuk pemerintahan setempat tidak dapat berjalan lancar, sehingga Jepang merasa perlu mengangkat pegawai-pegawai yang terdiri dari orang Indonesia. Misalnya di Jawa Tengah, Rd. Muhamad Khalil dijadikan wakil gubernur, dan Salaman dijadikan residen.

Karena tenaga pemerintahan sipil Jepang yang diharapkan sudah tiba di pulau Jawa belum datang, dalam bulan Agustus 1942 pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang 28 tentang pemerintahan syuu dan tokubetsu syi untuk merealisasi struktur pemerintahan yang sudah direncanakan

sebelumnya. Oleh pihak Jepang, kecuali Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa, seluruh Jawa dibagi atas syuu, ken (kabupaten)/syi (kota), gun (kawedanan), son (kecamatan), dan ku (desa). Dengan demikian provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa Timur dihapuskan, dan sebagai gantinya dibentuk daerah pemerintahan yang disebut syuu. Masing-masing syuu itu dikepalai oleh syuu cookan dan diseluruh pulau Jawa terdapat 17 syuu. Daerah syuu hanya seluas karesidenan, tetapi kekuasaan seorang syuu cookan sama besar dengan kekuasaan gubernur.

Sementara itu dalam usahanya mempersatukan semua orang Asia yang pro pihaknya, Jepang membentuk pergerakan Tiga A (Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia). Gerakan tersebut tidak berlangsung lama, sebab organisasi itu dibentuk oleh pejabat-pejabat sipil kantor propaganda tanpa dukungan para pejabat militer yang memandang gerakan tersebut dengan kecurigaan.

Lepas dari masalah tersebut sebenarnya pihak Jepang memang mengharapkan terjalinnya hubungan kerja sama dengan para pemimpin Indonesia untuk memperlancar pekerjaan Gunseibu, sebab pegawai Gunseibu yang jumlahnya di sekitar 300 orang dan yang datang bersama-sama dengan tentara Jepang di Jawa tidak semuanya merupakan pegawai pemerintahan, apa lagi jumlah ini terasa sangat kurang di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya. Meskipun kekurangan jumlah pegawai itu sudah dicoba diatasi dengan penempatan tenaga militer dan tenaga sipil, tetapi jumlah tenaga yang ditempatkan itu belum dapat menutup kebutuhan yang ada. Dalam rangka kegiatan Jepang mendekati para pemimpin Indonesia, Drs. Moh. Hatta dapat ditarik ke pihaknya. Tetapi tokoh tersebut menyatakan bahwa dirinya hanya bersedia menjadi penasehat dan tidak menjadi pegawai.

Tidak lama kemudian dalam usaha mendekati para pemimpin Indonesia itu Jepang memperoleh hasil yang lebih besar berupa kesediaan Ir. Sukarno untuk bekerja sama, meskipun

kesediaan tersebut disertai syarat yang berat bagi Jepang tetapi positif bagi bangsa Indonesia, yaitu adanya jaminan dari pihak Jepang bahwa pemerintah militer Jepang tidak akan merintangai usaha Ir. Sukarno untuk membina kemerdekaan Indonesia.

Dalam pada itu di antara Drs. Moh. Hatta dan Ir. Sukarno tercapai kata sepakat untuk mengesampingkan perselisihan si antara kedua pihak yang pernah terjadi pada masa lampau di sekitar masalah PNI/Partindo, persatuan di antara kedua tokoh penting Indonesia itu dikenal sebagai "dwi tunggal". 1)

Selanjutnya dalam rangka kerjasama antara pemimpin Indonesia dan Jepang pernah terbentuk Komisi Menyelidiki Adat Istiadat dan Tata Negara pada tanggal 8 November 1942. Anggota komisi itu terdiri dari tiga belas orang Jepang dan para pemimpin politik dan sosial bangsa Indonesia misalnya Drs. Moh. Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Abikusno Cokrosuyoso, K.H. Mas Mansur, Ki Hajar Dewantoro, Prof. Husein Jayadiningrat, Dr. R. Ng. Purbocaroko, Prof. Dr. Mr. Supono. Kemudian empat orang tokoh Indonesia yang dianggap paling terkemuka yaitu Ir. Sukarno, Drs. Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantoro dan K.H. Mas Mansur diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah gerakan yang terkenal dengan nama Pusat Tenaga Rayat (Putera) yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Menurut pihak Jepang tugas Putera ialah mengerahkan segala tenaga dan kekuatan rakyat untuk memberi bantuan kepada usaha-usaha mencapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya.

Dalam perkembangan kemudian ternyatalah bahwa Perang Pasifik yang tidak kunjung juga selesai itu makin lama makin merugikan pihak Jepang. Dalam kedudukannya yang semakin tidak menguntungkan bagi pihaknya itu Jepang makin mendekati diri kepada para pemimpin Indonesia. Dalam rangka kegiatan itu pada tanggal 1 Oktober 1943 Prof. Husein Jayadiningrat diangkat menjadi Kepala Departemen Urusan Agama, dan pada tanggal 10 November 1943 Mas Sutarjo Kartohadikusumo dijadikan syuucokan Jakarta sedang R.M.T.A. Surio dijadikan syuucokan Bojonegoro.

Dalam bulan September 1943 diangkat tujuh orang penasihat bangsa Indonesia pada pemerintah militer Jepang. Mereka disebut sanyo dan mereka ditempatkan pada enam bu (departemen), yaitu :

- a. Ir. Sukarno pada Soomubu (Departemen Urusan Umum).
- b. Mr. Suwandi dan Dr. Abdul Rasyid untuk Naimubu (Departemen Urusan Dalam Negeri).
- c. Prof. Dr. Mr. Supono untuk Syihoobu (Departemen Kehakiman).
- d. Mukhtar bin Prabu Mangkunegoro untuk Kotsubu (Departemen Lalulintas).
- e. Mr. Moh. Yamin untuk Sendenbu (Departemen Propaganda).
- f. Prawoto Sumodilogo untuk Sangyabu (Departemen Ekonomi).

Pada tahun 1943 pemerintah pendudukan Jepang mendirikan badan pertimbangan di tingkat pusat, di tingkat syuu dan di kota istimewa Jakarta. Yang ditingkat pusat disebut Cuoo Sangi In, yang di tingkat syuu disebut Syuu Sangi Kai dan yang di Jakarta disebut Tokubetsu Sangikai. Cuoo Sangi In sebagai badan pertimbangan pusat mempunyai kewajiban mengajukan usul kepada Pemerintah dan menjawab pertanyaan Pemerintah mengenai soal-soal politik dan menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Jumlah seluruh anggota Cuoo Sangi In adalah 43 orang; yang 23 merupakan hasil pengangkatan Saikoo Syikikan; yang 18 adalah para wakil dari syuu-syuu serta wakil dari kota istimewa Jakarta, sedang yang dua lagi adalah wakil dari Kraton Yogyakarta dan Kraton Surakarta. Yang menjadi wakil dari Kraton Yogyakarta ialah B.P.H. Puruboyo. Pangeran ini dapat menjadi anggota Cuoo Sangi In sebagai wakil dari Kraton Yogyakarta karena beberapa faktor : pertama, pada waktu itu beliau mempunyai kedudukan sebagai pengageng (kepala) Parentah Luhur Kraton; kedua, beliau cukup mempunyai kepandaian karena beliau pernah belajar di T.H. Delft

sampai tingkat kandidat dan belajar di R.H. Jakarta sampai tingkat kandidat pula; ketiga, pihak Jepang menghendaki agar ada wakil dari Kraton Yogyakarta; keempat, beliau ditugaskan oleh Sri Sultan IX, mewakili Kasultanan Yogyakarta. 2)

Sidang Cuoo Sangi In yang pertama berlangsung pada tanggal 16 - 20 Oktober 1943. Dalam sidang itu dibentuk empat bunkakai (bagian) yang kemudian ternyata dapat menjawab pertanyaan Saikoo Syikikan mengenai cara-cara yang sebaiknya dilakukan Pemerintah agar kemenangan akhir dalam perang dapat tercapai. Karena sidang itu dihadiri oleh para pembesar Jepang yang penting-penting maka mau tidak mau terpaksa jawaban yang diberikan atas pertanyaan Pemerintah ialah agar seluruh potensi kerja dan produksi dikerahkan untuk mencapai kemenangan dalam perang.

Dengan demikian maka pemerintah militer Jepang mulai memikirkan pengarahannya para pemuda Indonesia untuk membantu usaha perang mereka. Sejak armada - armadanya mengalami kekalahan di dekat Midway dan di sekitar kepulauan Salomon, Jepang mulai bersikap defensif di mana wilayah Indonesia menjadi front depan. Untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya, Jepang mengadakan latihan-latihan militer bagi pemuda Indonesia. Pada tahap pertama dilatihlah lebih kurang 50 orang pemuda di Seinen Doojoo (tempat latihan pemuda) di Tangerang. Sesudah itu, pada tanggal 29 April 1943 dibentuk Keibodan (Barisan pembantu Polisi) dan Seinendan (Barisan Pemuda). Para pemuda yang menjadi anggota kedua barisan tersebut mendapat latihan militer secara elementer dengan senjata-senjata tiruan yang dibuat dari kayu. Sementara itu terdapat pula pergerakan tenaga heiho (pembantu prajurit), yang semula merupakan tenaga pekerja kasar tetapi kemudian dikerahkan untuk melaksanakan tugas-tugas bersenjata.

Dalam perkembangan selanjutnya, karena adanya tuntutan perang yang makin mendesak, pihak Jepang merasa perlu untuk membentuk organisasi militer yang sebenarnya di Indonesia . Secara kebetulan sebelum maksud itu direalisasi ada

usul dari seorang tokoh nasionalis Indonesia yaitu R. Gatot Mangkupraja yang dengan suratnya kepada Gunseikan pada tanggal 7 September 1943 minta kepada pemerintah pendudukan Jepang agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu Jepang tidak saja di garis belakang tetapi juga di garis depan. Dengan demikian pada tanggal 3 Oktober 1943 panglima yang kedua Tentara keenambelas, Letnan Jenderal Kumakici Harada memaklumkan Osamu Seirei No. 44 yang mengatur pembentukan tentara sukarela Pembela Tanah Air (Peta).

Pada tanggal 8 Januari Jepang memperkenalkan sistem baru, yaitu sistem yang disebut tonarigumi (rukun tetangga), suatu sistem yang dimaksudkan untuk memperketat pengendalian terhadap penduduk. Tonarigumi dilaksanakan dengan jalan membagi seluruh pulau Jawa atas bagian-bagian yang kecil yang masing-masing terdiri dari 10 sampai 20 rumah tangga, kemudian beberapa tonarigumi dikelompokkan menjadi ku yaitu desa atau bagian dari kota. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh tonarigumi di antaranya ialah mengadakan latihan menghadapi bahaya udara, kebakaran atau mata-mata musuh; mengatur pembagian beras, minyak atau gula kepada penduduk, dan melakukan kegiatan lain dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau dengan tujuan membantu pemerintah militer Jepang.

Setelah sistem tonarigumi dapat berjalan seperti yang diharapkan, pemerintah militer Jepang membentuk organisasi Jawa Hookookai. Organisasi ini dipimpin oleh Gunseikan, sedang Ir. Sukarno menjadi penasihat. Dengan lahirnya Jawa Hookookai, Putera dibubarkan, sedang organisasi-organisasi yang bersifat kebaktian kepada Jepang misalnya Fujinkai (perkumpulan wanita), Kakyoo Sookai (perkumpulan Orang Cina), Tai Iku Kai (perkumpulan olah raga), Keimin Bunka Syidoo-syoo (perkumpulan kebudayaan) dilebur ke dalam Jawa Hookookai.

Tetapi sementara itu Jepang selalu mengalami kekalahan dalam perangnya. Sebagai contoh dalam bulan Juli 1944

Kepulauan Saipan yang letaknya strategis, jatuh ke tangan Amerika. Kecuali itu dalam bulan Agustus 1944 situasi di dalam negeri Jepang sudah mulai tampak menjadi lebih buruk. Moral masyarakat mundur; produksi perang merosot sehingga persediaan senjata dan amunisi berkurang; urusan logistik menjadi masalah yang berat karena hilangnya sejumlah besar kapal angkut; kapal perang banyak yang hancur atau tenggelam; itulah beberapa masalah yang dihadapi oleh Jepang. Karena keadaan yang sedemikian itu maka pada tanggal 7 September 1944, di dalam sidang istimewa Teikoku Gikai (parlemen Jepang) ke 85 di Tokyo, Perdana Menteri Toyoo mengumumkan tentang pendirian pemerintah Jepang, bahwa daerah To Indo atau Hindia Timur atau Indonesia di kelak kemudian hari diperkenankan memperoleh kemerdekaan. Dengan pernyataan yang sedemikian itu Jepang mengharapkan agar bangsa Indonesia mempunyai harapan akan kembali menjadi bangsa merdeka dan benar-benar berdiri di pihaknya. Dengan demikian jika pada suatu waktu tentara Serikat menyerbu ke Indonesia, oleh bangsa Indonesia tentara tersebut pasti diterima sebagai tentara penyerbu ke daerah merdeka dan tidak diterima sebagai tentara pembebas. 3)

Selanjutnya, supaya mendapat bantuan sebesar-besarnya dari bangsa Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 (sambil memperingati mendaratnya tentara Jepang di pantai utara pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1940), pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan pengumuman bahwa :

- a. Akan didirikan Dokuritsu Juumbi Coosakai atau badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan (disingkat Badan Penyelidik), dan
- b. Pembicaraan mengenai kemerdekaan yang sudah dijanjikan pada tanggal 7 September 1944 akan diperluas.

Tetapi Badan Penyelidik itu baru didirikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan adanya Hari Raya Tencoo

setsu atau Hari Ulang Tahun Tenno Heika, maharaja Jepang. Tetapi pada hari itu diumumkan nama-nama ketua, wakil-wakil ketua dan para anggota. Setelah pada permulaan bulan Mei dapat diselesaikan persiapan kantor tata usaha, tempat perundingan dan sebagainya, maka pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pembukaan Badan untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dipimpin oleh Saikoo Sikikan sendiri itu.

Pada waktu itu susunan Badan Penyelidik itu adalah sebagai berikut :

- Ketua (Kaicoo) – Dr. K.R.T. Rajiman Wediodiningrat.
- Ketua Muda – Ichibangse, seorang anggota luar
- (Fuku Kaicoo) biasa (Tokubetsu lin).
- Ketua Muda – R.P. Suroso (merangkap kepala tata
- (Fuku Kaicoo) usaha atau Zimukyoku Kucoo)

Sebagian besar dari enam puluh (60) orang anggota biasa (lin) bangsa Indonesia (tidak termasuk Ketua dan Ketua Muda), berasal dari pulau Jawa, selebihnya berasal dari Sumatera, Maluku, Sulawesi, dan beberapa orang peranakan Eropa, Cina dan Arab, tetapi semuanya bertempat tinggal di Jawa, karena Badan Penyelidik itu diadakan oleh Saikoo Sikikan Jawa.

Nama para anggota itu menurut nomer tempat duduknya dalam sidang adalah sebagai berikut : 1. Ir. Sukarno, 2. Mr. Muh. Yamin, 3. Dr. R. Kusumah Atmaja, 4. R. Abdulrahim Pratalikrama, 5. R. Aris, 6. Ki Hajar Dewantoro, 7. Ki Bagus H. Hadikusumo, 8. B.P.H. Bintoro, 9. A.K. Muzakir, 10. B.P.H. Puruboyo \*), 11. R.A.A. Wiranakusuma, 12. Ir. R. Asharsuteju, 13. Ui Tiang Cui, 14. Drs., Moh. Hatta, 15. Ui Cong Hauw, 16. H. Agus Salim, 17. M. Sutarjo Kartohadikusumo, 18. R.M. Margono Joyohadikusumo, 19. K.H. Abdul Halim, 20. K.H. Masjkur, 21. R. Sudirman, 22. Prof. Dr. P.A.H. Joyodiningrat, 23. Prof. Dr. Supono, 24. Prof. Ir. R. Rooseno, 25. Mr. R. Panji Singgih, 26. Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso, 27. R.M.T.A. Suryo, 28. R. Rooslan Wongsokusumo, 29. Mr. R. Susanto Tirtoprojo,

---

\*) jadi seperti terlihat di atas, G.P. Puruboyo menjadi anggota dan menduduki kursi No. 10.

30. Ny. R.S.S. Sunaryo Mangunpuspito, 31. Dr. R. Buntaran Martoatmojo, 32. Liem Kun Hian, 33. Mr. J. Latuharhari, 34. Mr. Hendromartono, 35. R. Sukarjo Wiryopranoto, 36. Haji Ah. Sanusi, 37. A.M. Dasaad, 38. Mr. Tan Eng Hoa, 39. Ir. R.M.P. Surakhman Cokroadisuryo, 40. R.A.A. Sumitro Kolopaking Purbonegoro, 41. K.R.M.T.H. Wuryaningrat, 42. Mr. A. Subarjo, 43. Prof. Dr. R. Jenal Asikin Wijayakusuma, 44. Abikusno Cokrosuyoso, 45. Parada Harahap, 46. Mr. R.M. Sartono, 47. K.H.M. Mansur, 48. Drs. K.R.M.A. Sosroningrat, 49. Mr. R. Suwandi, 50. K.H.A. Wakhid Hasyim, 51. P.F. Dahler, 52. Dr. Sukiman, 53. Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro, 54. R. Otto Iskandar Dinata, 55. A. Baswedan, 56. Abduk Kadir, 57. Dr. Samsi, 58. Mr. A.A. Maramis, 59. Mr. R. Samsudin, 60. Mr. R. Sastro-mulyono. 4)

Selama Badan Penyelidik ini berdiri telah mengadakan masa sidang dua kali, yaitu : (1) Masa sidang pertama, mulai 29 Mei sampai 1 Juni 1945, (2) Masa sidang kedua, mulai tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945.

Di dalam masa sidang pertama barulah dikemukakan beberapa pendapat dan usul-usul, baik mengenai dasar negara maupun mengenai rancangan U.U.D. Sedangkan masa sidang kedua dapat di uraikan sebagai berikut : (a) sidang tanggal 10 dan 11 Juli 1945 merupakan sidang pleno; (b) sidang tanggal 11 dan 13 Juli 1945 adalah sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar; (c) sidang tanggal 14 sampai 16 Juli 1945 merupakan sidang pleno lagi.

Pada sidang pleno tanggal 10 Juli 1945 diumumkan oleh ketua mengenai penambahan anggota baru Badan Penyelidik sebanyak 6 orang yaitu : Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Surio Hamijoyo, Mohammad Noor, Mr. Besar dan Abdul Kaffar. Kemudian Ir. Sukarno selaku ketua panitia kecil yang dibentuk di dalam masa sidang pertama yang bertugas membahas pendapat/usul-usul para anggota melaporkan hasil pekerjaannya. Di dalam laporan itu antara lain dikemukakan, bahwa panitia kecil yang dipimpinnya telah mengadakan pertemuan dengan tokoh-

tokoh Badan Penyelidik yang lain (38 orang tokoh) pada tanggal 22 Juni 1945. Di dalam pertemuan itu telah dibentuk pula panitia kecil terdiri atas sembilan orang, yang kemudian menghasilkan satu persetujuan mengenai rancangan pembukaan hukum dasar yang terkenal dengan sebutan "Piagam Jakarta". Pada sidang tanggal 10 Juli itu juga telah diambil keputusan mengenai bentuk negara. Dari 64 suara, 55 suara memilih bentuk republik, enam suara memilih bentuk kerajaan, dua suara memilih bentuk lain dan satu suara blanko. Pada sidang pleno tanggal 11 Juli 1945 telah diambil keputusan mengenai daerah negara baru. Dari 66 suara, yang setuju daerah Hindia Belanda dulu 19 suara, Hindia Belanda ditambah Malaya, tetapi dikurangi Irian Barat enam suara, Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Irian Timur, Timor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya 39 suara.

Keputusan lain ialah dibentuk tiga panitia yaitu :

- a. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno dengan anggota : (1) Maramis, (2) Otto Iskandardinata, (3) Puruboyo, (4) A. Salim, (5) Suhardiyo, (6) Supomo, (7) Ny. Ulfa Santoso, (8) Wakhid Hasyim, (9) Parada Harap, (10) Latuharhari, (11) Susanto, (12) Sartono, (13) Wongsonegoro, (14) Wuryaningrat, (15) Singgih, (16) Tan Ang Hoa, (17) Husein Joydiningrat, (18) Sukiman.

Di samping itu ada seorang anggota luar biasa bangsa Jepang, yaitu Myano.

- b. Panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso dengan anggota : (1) Abdul Kadir, (2) Asikin, (3) Bintoro, (4) hendromartono, (5) Muzakir, (6) Sanusi, (7) Munandar, (8) Samsudin, (9) Sukarjo Wiryopranoto, (10) Suryo, (11) Abdul Kaffar, (12) Masykur, (13) Abdul Halim, (14) Kolopaking, (15) Sudirman, (16) Aris, (17) Mohd. Noor, (18) Pratalykrama, (19) Liem Kun Hian, (20) Buntaran, (21) Ruslan, (22) Ny. Sunaryo.

Anggota istimewa ialah Tanaka Kakka dan Matuura, keduanya bangsa Jepang.

- c. **Panitia keuangan dan ekonomi diketuai oleh Drs. Moh. Hatta dengan anggota :** (1) Surakhman, (2) Margono, (3) Sutarjo, (4) Samsi, (5) Rooseno, (6) Surio Hamijoyo, (7) Ki Hajar Dewantoro (8) Kusumo Atmojo, (9) Dasaad, (10) Ui Tiong Hauw, (11) Asikin, (12) Dahler, (13) Besar, (14) Yamin, (15) Baswedan, (16) Hadikusumo, (17) Sastro-mulyono, (18) Abd. Fatah Hasan, (19) Mansur, (20) Ui Tiang Cui, (21) Wiranatakusuma, (22) Suwandi.  
Anggota istimewa ialah Tokonami Kakka, bangsa Jepang.  
5)

Sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 11 Juli 1945 telah mengambil keputusan.

- 1). Membentuk panitia perancang "declaration of right" terdiri dari Subarjo sebagai ketua dan Sukiman dan Parada Harahap sebagai anggota.
- 2). Mengenai unitarisme dan federalisme, segenap anggota setuju unitarisme, kecuali dua anggota.
- 3). Mengenai isi preambull (bukan kata-kata) semua anggota setuju.
- 4). Mengenai pemimpin negara, sepuluh orang setuju di tangan satu orang, sembilan suara lainnya tidak setuju.
- 5). Mengenai soal nama kepala negara, nama presiden disetujui oleh 12 suara.
- 6). Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo dengan anggota Wongsonagoro, Subarjo, Maramis, Singgih, A. Salim dan Sukiman.

Pada sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar Tanggal 13 Juli 1945, ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar menyerahkan rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia kepada panitia perancang Undang-Undang Dasar dan memberikan uraian yang antara lain yang penting : Kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat

yang bersidang sekali dalam lima tahun. Badan ini memegang kekuasaan yang tertinggi. Tugas sehari-hari dilaksanakan oleh presiden sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Di dalam pemerintahan presiden dibantu oleh wakil presiden, menteri menteri yang bertanggung jawab kepadanya dan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Dalam membentuk undang - undang, presiden harus semufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang Dasar ini terdiri dari 15 bab, 42 pasal termasuk lima pasal peraturan peralihan dan satu pasal aturan tambahan. Untuk memperbaiki redaksi rancangan Undang-Undang Dasar tersebut, dibentuklah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari : Jayadiningrat, Salim dan Supomo. 6)

Pada sidang pleno tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 1945 dibicarakan :

- 1) Pernyataan Kemerdekaan Indonesia (Declaration of Independence).
- 2). Pembukaan Undang - Undang Dasar (hasil panitia Kecil).
- 3). Undang - Undang Dasar (hasil panitia perancang Undang - Undang Dasar).

Rancangan Undang-Undang Dasar yang semula mempunyai 42 pasal itu setelah diadakan pembahasan, kemudian sidang pada tanggal 16 Juli 1945, menyetujui rancangan Undang Undang Dasar tersebut menjadi 36 pasal. Selanjutnya mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 secara final dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini terdiri atas 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua yaitu :

Ketua : Ir. Sukarno.

Wakil Ketua : Drs. Moh. Hatta.

Anggota : (1) Dr. Rajiman Wediodiningrat, (2) Ki Bagus Hadikusumo, (3) Otto Iskandardinata, (4) Pangeran Puruboyo, (5) Pangeran Suryohamijoyo, (6) Sutarjo Kartohadikusumo, (7) Prof. Dr. Supomo, (8) Abdul Kadir, (9) Drs. Yap Cwan Bing, (10) Dr. Mohammad Amir, (11) Mr. Abdul Abbas, (12) Dr. Ratulangi, (13) Andi Pangerang, (14) Mr. Latuharhary, (15) Mr. I Gusti Ketut Puja, (16) A.H. Hamidan, (17) R.P. Suroso, (18) Abdul Wakhid Hasyim, (19) Mr. Mohammad Hasan.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat di rumah Laksamana Muda Jepang Maeda Jl. Imam Bonjol no. 1 Jakarta. Selain anggota PPKI, hadir pula beberapa angkatan muda dan golongan tua misalnya : Sukarni, Khaerul Saleh dan B.M. Diah (golongan muda) dan Dr. Buntaran, Semaun Bakri (golongan tua). Rapat berakhir jam 04.00 dengan hasil tersusunnya teks Proklamasi. Teks aslinya ditulis dengan tangan memakai pensil, kemudian ditik oleh Sayuti Melik. Proklamasi ditandatangani oleh Sukarno - Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada 17 Agustus 1945 hari Jum'at Legi jam 10.00 bertempat di Pegangsaan Timur 56 diproklamkanlah kemerdekaan Indonesia. Yang membaca proklamasi adalah Ir. Sukarno sendiri. Setelah proklamasi lalu dikibarkanlah bendera Merah - Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Yang mengibarkan bendera Merah-Putih adalah seorang Cudanco PETA (Pembela Tanah Air) bernama Latif Hendraningrat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang, setelah ditambah anggota baru sebanyak sembilan orang, sehingga jumlahnya menjadi 30 orang. Anggota baru tersebut ialah : Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Mr. Akhmad Subarjo, Wikana, Khairul Saleh dan Sukarni.

Dalam sidang tersebut telah disetujui dan ditetapkan :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Presiden dan wakil presiden. 7)

## **2. Keadaan di Kraton Kasultanan Yogyakarta.**

Yang bertahita sebagai sultan di istana kasultanan Yogyakarta pada jaman Jepang adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pada jaman ini susunan pemerintahan di kraton kasultanan mengalami perubahan. Urusan kraton, urusan prajurit dan urusan pengadilan diurus oleh seorang pangeran.

Ketika mula-mula memerintah sebagai sultan, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mendapat bantuan dari seorang patih. Tetapi, sesudah patih itu dipensiun, Sri Sultan tidak me-

angkat patih yang baru. Sebagai ganti patih tersebut, Sri Sultan membentuk beberapa departemen atau paniradya yang berdiri sendiri-sendiri. Masing-masing paniradya dikepalai oleh seorang abdi dalem (pegawai) yang berpangkat bupati. Kepala paniradya itu disebut paniradya pati. Setiap paniradya juga mempunyai sekretaris. Sekretaris ini juga harus seorang abdi dalem yang berpangkat Sana Panitera. Masing-masing paniradya terdiri dari bagian-bagian. Setiap bagian dikepalai oleh abdi dalem yang berpangkat bupati swedamuka. Kalau ada masalah yang dianggap penting, paniradya pati dapat langsung menghadap Sri Sultan.

Adapun paniradya-paniradya itu adalah :

- a. Paniradya Kepanitraan (Sekretariat).
- b. Paniradya Wiyata Praja (Departemen Pendidikan).
- c. Paniradya Ekonomi (Departemen Ekonomi).
- d. Paniradya Rancana Pancawarna (Departemen Penerangan).
- e. Paniradya Praja (Departemen Pemerintahan).
- f. Paniradya Suyasa (Departemen Pekerjaan Umum).
- g. Paniradya Pariharta (Departemen Keuangan).

Pada waktu itu pemerintah pendudukan Jepang berusaha menjepangkan apa saja. Di kota-kota lain pemerintah pendudukan sudah membuat peraturan bahwa jalan-jalan harus diberi nama Jepang. Di Yogyakarta hal seperti itu belum sampai terjadi, sebab Sri Sultan sudah membuat peraturan bahwa nama-nama jalan yang tadinya memakai nama Belanda harus diganti dengan nama-nama Jawa.

Kecuali itu, supaya Yogyakarta tidak terhanyut arus Japanisasi, Sri Sultan memerintahkan agar para bangsawan Yogyakarta berpegang teguh pada sifat kejawaan mereka. Misalnya, pada waktu menghadiri acara-acara resmi, hendaknya para bangsawan itu berpakaian Jawa asli. 8)

### 3. Kegiatan BPH Puruboyo.

Pada jaman penjajahan Jepang, mula-mula G.P. Puruboyo masih berkedudukan sebagai pengageng Parentah Luhur Kraton, tetapi kemudian berubah menjadi pengageng Kawedanan Kori.

Di luar kraton pada waktu itu G.P. Puruboyo mempunyai kedudukan sebagai ketua Badan Pembantu Prajurit Tanah Air di mana Dr. Sukiman sebagai wakil ketua dan Wiwoho sebagai sekretaris. Badan tersebut berkantor di Jalan Brigjen Katamso (Gondomanan) di sebelah selatan gedung perusahaan kopi "Thio" sekarang. Adapun tugas badan tersebut ialah memberi semangat kepada para prajurit di seluruh Indonesia. Tetapi, sampai Jepang pergi dari Indonesia, badan tersebut belum bekerja sebagaimana diharapkan, kecuali menyelenggarakan sidang - sidang. Dalam sebuah sidangnya pernah terjadi perdebatan mengenai pemindahan makam P. Diponegoro dari Sulawesi ke Yogyakarta. Pada waktu itu muncul seorang pembicara yang berasal dari Sulawesi yang mengatakan bahwa ia keberatan jika makam P. Diponegoro dipindahkan, sebab P. Diponegoro bukan hanya milik orang Jawa tetapi juga milik orang Sulawesi bahkan milik rakyat Indonesia seluruhnya.

Sementara itu, seperti yang sudah disinggung pada uraian terdahulu, pada masa pemerintahan Jepang G.P. Puruboyo mendapat pengangkatan menjadi anggota Cuo Sangiin, mewakili pemerintahan Kasultanan Yogyakarta. Setelah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) terbentuk ia juga menjadi anggotanya. Menurutnya, pada waktu badan tersebut ada, ia dapat mengikuti sidang-sidang sebanyak tiga kali. Pada waktu itu untuk dapat mengikuti sidang-sidang BPUPKI G.P. Puruboyo harus pergi ke Jakarta dan menginap di kota tersebut. Selama berada di Jakarta biasanya G.P. Puruboyo menginap di rumah keluarga. Kemudian, pada waktu BPUPKI sudah ditingkatkan statusnya menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ia tetap menjadi anggotanya. Dengan demikian pada waktu sidang PPKI yang diperluas berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945, ia juga hadir. Ia

masih ingat bahwa segera sesudah rapat PPKI tersebut selesai, Bung Karno yang pada waktu itu sudah dipilih menjadi presiden, berseru kepada semua anggota agar mereka segera kembali ke daerah masing-masing, supaya mereka segera dapat menyirinkan hal-hal penting yang dihasilkan oleh rapat PPKI tersebut. Karena seruan tersebut, para anggota, termasuk G.P. Puruboyo, segyra pulang ke daerah masing-masing. Ia pulang ke Yogyakarta dengan kereta api mylalui Sukabumi dan Bandung. Sesampai di Yogyakarta ia memberi laporan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX bahwa : (1) bangsa Indonesia telah merdeka; (2) Bung Karno dan Bung Hatta telah dipilih menjadi presiden dan wakil presiden, dan (3) bangsa Indonesia sudah mempunyai undang-undang dasar. 9).

\* \* \* \* \*

## BAB IV

### PADA JAMAN KEMERDEKAAN

#### 1. Pada Awal Jaman Kemerdekaan.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama. Sidang ini menghasilkan beberapa keputusan penting antara lain :

- a. Mengesahkan undang-undang dasar.
- b. Memilih presiden dan wakil presiden.
- c. Presiden untuk sementara waktu akan dibantu sebuah Komite Nasional.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang lagi. Sidang tersebut memutuskan dibentuknya 12 departemen, dan menetapkan pembagian wilayah Negara Republik Indonesia atas delapan provinsi.

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Sukarno dalam pidato radionya menyatakan berdirinya tiga badan baru yaitu :

- a. Komite Nasional Indonesia (KNI).
- b. Partai Nasional Indonesia (PNI).
- c. Badan Keamanan Rakyat (BKR).

Para pemuda merasa kecewa, karena pemerintah tidak segera membentuk sebuah tentara nasional, tetapi hanya membentuk BKR. Meskipun demikian, para pemuda yang mempunyai pengalaman dalam bidang kemiliteran yaitu ex. anggota PETA, KNIL dan Heiho segera membentuk BKR di daerah masing-masing dan menggunakan BKR itu sebagai wadah perjuangan mereka. Sementara itu sebagian dari para pemuda membentuk badan-badan perjuangan yang lain seperti Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hisbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia

(BPRI) dan lain sebagainya. Di samping itu terdapat badan perjuangan yang bersifat khusus misalnya kesatuan-kesatuan pelajar. Barisan Pelopor sudah menyatakan diri bernaung di bawah Komite Nasional Indonesia (KNI). Sementara itu di pulau Sumatera juga terbentuk badan-badan perjuangan, demikian pula di daerah-daerah lainnya.

BKR dan badan-badan perjuangan yang dibentuk para pemuda itu selalu berusaha merebut kekuasaan dan senjata dari tangan orang-orang Jepang, padahal orang-orang Jepang itu tidak mau mengakui adanya Republik Indonesia, sebab mereka mentaati perintah pihak Serikat agar mereka memelihara status quo sejak tanggal 15 Agustus 1945. Hal yang sedemikian itu menyebabkan terjadinya pertempuran-pertempuran di antara dua pihak yang kadang-kadang sampai menimbulkan korban jiwa yang besar jumlahnya.

Pada waktu itu hal yang merupakan masalah berat bagi para pemuda dalam usaha mereka merebut kekuasaan adalah kehadiran tentara Serikat. Pasukan Serikat yang bertugas di Indonesia itu merupakan komando khusus dari Southeast Asia Comand (SEAC) yang diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang mempunyai tiga divisi di bawah Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas AFNEI di Indonesia adalah melaksanakan perintah Gabungan Kepala Staf Serikat yang diberikan kepada SEAC, di antaranya ialah :

1. menerima penyerahan dari tangan Jepang.
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Serikat.
3. melucuti, mengumpulkan dan kemudian memulangkan orang-orang Jepang.
4. menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil.
5. menghimpun keterangan tentang dan menuntut penjahat perang di depan pengadilan Serikat. 1)

Kedatangan pasukan-pasukan Serikat disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Hanya saja setelah diketahui bahwa pasukan Serikat Inggris itu datang membawa orang-orang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang dengan terang-terangan hendak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda, sikap bangsa Indonesia berubah menjadi curiga, bahkan akhirnya bermusuhan. Tetapi agaknya Christison telah memperhitungkan bahwa usaha-usaha pasukan-pasukan Serikat tidak akan berhasil tanpa bantuan Pemerintah Republik Indonesia. Buktinya, Christison mau berunding dengan Pemerintah RI dan mengakui de facto Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Sejak adanya pengakuan de facto terhadap pemerintah RI dari Panglima AFNEI itu, masuknya pasukan Serikat ke wilayah RI diterima dengan terbuka oleh pejabat-pejabat RI. Tetapi ternyata di kota-kota yang didatangi oleh pasukan Serikat seringkali terjadi insiden-insiden bahkan pertempuran-pertempuran dengan pihak RI, karena pasukan-pasukan Serikat/Inggris tidak menghormati kedaulatan bangsa Indonesia, dan beberapa orang anggota pimpinan nasional di-teror bahkan ada yang akan dibunuh. Pertempuran terjadi di Surabaya, Magelang, Ambarawa, Semarang dan Medan.

Pemerintah RI rupanya menyadari, bahwa hanya dengan Badan Keamanan Rakyat yang dibentuk secara lokal tidak dapat di adakan perlawanan secara terkoordinir dan terpusat, sehingga tidak akan mungkin mengamankan perjuangan. Karena itu kemudian Pemerintah memanggil pensiunan Mayor KNIL, Urip Sumoharjo untuk diserahi tugas menyusun tentara nasional. Pada tanggal 5 Oktober keluarlah Maklumat Pemerintah, yang menyatakan berdirinya tentara nasional yang disebut Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sebagai pemimpin TKR ditunjuk Suprijadi, tokoh pemberontakan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) terhadap Jepang di Blitar, dan sebagai Menteri Keamanan Rakyat ad interim diangkat Moh. Suljoedikusumo seorang bekas daidanco Peta. Dengan dasar Maklumat Pemerintah tersebut segera dibentuk Markas Besar Umum oleh

Urip Sumoharjo dengan berkedudukan di Yogyakarta. Di pulau Jawa dibentuk sepuluh divisi dan di Sumatra dibentuk enam divisi. Kekuatan tentara tersebut mendapat tambahan kekuatan dari badan perjuangan golongan pemuda.

Sementara itu perlawanan rakyat terhadap pasukan Serikat meningkat, sehingga pihak Serikat merasa kewalahan. Tetapi Jenderal Christison segera menyatakan bahwa ia akan menggunakan kekuatannya untuk menegakkan keamanan dan ketertiban, terutama di Jawa Barat, karena daerah tersebut dianggap sebagai tempat merajalelanya terorisme. Sudah barang tentu pernyataan itu mendapat sambutan hangat dari panglima angkatan perang Belanda Laksamana Helfrich. Laksamana itu segera memerintahkan kepada pasukannya untuk membantu pasukan Jenderal Christison melaksanakan tugas di Jawa Barat.

Terhadap tentara Serikat yang bersifat agresif dan yang diboncengi tentara Belanda itu Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang bersifat mengingatkan, bahkan tugas tentara Serikat hanya untuk melucuti dan mengembalikan tawanan Jepang ke negara mereka, dan bahwa tentara Serikat itu tidak berhak mencampuri urusan politik.

Dalam bulan November 1945 Pemerintah Indonesia menyatakan keinginan bangsa Indonesia agar pihak Serikat, termasuk Belanda, mau mengakui eksistensi negara dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia juga menyatakan, bahwa pihak Republik Indonesia bersedia membayar semua utang-utang Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II, dan berjanji bahwa akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik asing yang sudah dikuasai Pemerintah. 2).

Kemudian pemerintah mengeluarkan pernyataan mengakui berdirinya partai-partai sebagai sarana pembantu perjuangan. Dalam kaitan itu, kabinet presidensiil yang berlaku pada waktu itu diganti menjadi kabinet parlementer yaitu kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Pemimpin kabinet bukan lagi presiden, tetapi perdana menteri. Yang men-

jabat sebagai perdana menteri dalam kabinet parlementer yang baru saja dibentuk itu adalah Sutan Syahrir.

Pemerintah baru atau kabinet Syahrir pertama segera mengadakan kontak diplomatik dengan pihak Belanda dan Inggris. Pihak Inggris lalu mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr sebagai duta istimewa ke Indonesia, sedang pihak Belanda diwakili oleh Dr. H.J. Van Mook. Dengan demikian mulai tanggal 10 Februari 1946 berlangsunglah perundingan. Dalam perundingan tersebut Dr. H.J. Van Mook mengajukan usul yang dalam garis besarnya sebagaiberikut :

- a. Indonesia akan dijadikan negara commonwealth berbentuk federasi yang memiliki self-government di dalam lingkungan Kerajaan Nederland.
- b. Masalah dalam negeri diurus Indonesia, sedang untuk luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda.
- c. Sebelum dibentuknya commonwealth akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun.
- d. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB.

Terhadap usul tersebut pihak Indonesia belum memberikan usul balasannya.

Sementara Persatuan Perjuangan melakukan oposisi terhadap kabinet Syahrir. Pihak oposisi berpendapat bahwa perundingan hanya dapat dilaksanakan atas dasar pengakuan sepenuhnya terhadap Republik Indonesia.

Di dalam sidang KNIP di Solo (28 Februari - 2 Maret 1946) mayoritas suara menentang kebijaksanaan Syahrir. Karena oposisi yang terlalu kuat itu kabinet Syahrir menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Tetapi kemudian Presiden menunjuk kembali Sutan Syahrir sebagai formatur kabinet dan karena itu Sutan Syahrir menjabat lagi sebagai perdana menteri (Kabinet Syahrir II); kabinet ini dibentuk pada 12 Maret 1946. Kabinet ini menyusun usul balasan pemerintah RI, yang terdiri atas 12 fasal antara lain :

- a. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda.
- b. Pinjaman-pinjaman Belanda sebelum tanggal 8 Maret 1942 menjadi tanggung jawab pemerintah RI.
- c. Federasi Indonesia - Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang berdiri atas orang-orang Indonesia dan Belanda.
- d. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara Republik Indonesia.
- e. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah Indonesia untuk dapat diterima sebagai anggota Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB).
- f. Selama perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melakukan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.

Usul balasan ini disampaikan kepada Van Mook, akan tetapi pihak Belanda tidak dapat menerima baik usul balasan permintaan RI tersebut, meskipun pihak Republik sudah memberikan konsesi-konsesi yang oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri hanya dapat diterima dengan keberatan-keberatan. 3)

Pada tanggal 20 - 10 - 1945 pasukan sekutu mendarat di Semarang, dan kemudian menuju ke Ambarawa serta tiba di Magelang pada tanggal 26 - 10 - 1945. Sebenarnya dari Magelang pasukan Sekutu itu akan menuju ke Yogyakarta dan menurut rencana pasukannya akan di tempatkan di daerah Kota Baru. Tetapi maksud dan rencana ini gagal. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa tentara Sekutu tidak pernah dapat menginjakkan kakinya di bumi Mataram (Yogyakarta). Bahkan akhirnya tentara Sekutu di Magelang pada tanggal 21 Nopember 1945 dapat dipukul mundur oleh pasukan-pasukan kita yang terdiri dari : dua batalyon TKR Yogyakarta yakni Batalyon X pimpinan Let. Kol. Suharto dan Batalyon VIII pimpinan Mayor Sarjono; pasukan kelayakaran antara lain Tentara Rakyat

Mataram (T.R.M.) dibawah pimpinan Soetarjo. Polisi Istimewa pimpinan Oni Sastroatmojo dan T.K.R. dari Purwokerto yang berkekuatan dua batalyon yaitu batalyon I pimpinan Iman Hadrongi dan batalyon gabungan Wijayakusuma pimpinan Mayor Sugeng Tirtosewoyo, serta TKR dan kelasykaran dari Kedu.

Sementara itu revolusi berjalan terus. Peranan radio sangat penting dalam penyiaran-penyiaran dan mengobarkan serta membakar semangat perjuangan rakyat. Di Daerah Yogyakarta di samping Radio Republik Indonesia yang berada di jalan Ngabean I, sekarang digunakan BNI 46 (Jalan KHA Dahlan) terdapat juga siaran radio gelap yang menamakan diri sebagai Radio Pemberontakan Mataram. Alat-alat dan tempat studio penyiarannya ada di kampung Kadipaten, dan setiap malam di bawah pimpinan Sutarjo (Bung Tarjo) senantiasa membakar semangat untuk menghancurkan musuh.

Tentara Inggris yang melihat semangat dan keberanian pasukan-pasukan kita menjadi khawatir dan kecil hatinya. Oleh karena itu dengan dalih akan membungkam siaran-siaran sombong dari radio kaum "extremis", "teroris" dan sebagainya, maka pada tanggal 25 dan 27 Nopember 1945 tentara Sekutu membom kota Yogyakarta. Mula-mula dua kemudian empat pesawat terbang RAF Inggris melayang-layang di atas kota Yogyakarta dan mulailah memuntahkan peluru-peluru mitraliyur, bom-bom rocket dan torpedo besar kecil di atas stasiun radio Republik Indonesia di Jalan Ngabean I. Balai Mataram, Sonobudoyo dan sekitarnya. Bangunan-bangunan tersebut mengalami kerusakan berat, sedang Balai Mataram (sekarang gedung Seni Sono) hancur lebur menjadi puing. Dengan adanya kejadian seperti itu, maka pada tanggal 25 - 11 - 1945 saat itu juga K.N.I. Daerah Yogyakarta dengan ditandatangani oleh Moh. Saleh atas nama Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII dan rakyat Yogyakarta, mengirim kawat kepada Presiden Sukarno dan P.M. Syahrir, yang berbunyi sebagai berikut :

”Jam 8.15 pagi ini, ada kapal terbang musuh menjatuhkan surat-surat sebaran, tidak diteken, bermaksud akan membom setasiun radio, di gedung Nillmy Yogyakarta Balapan Solo, karena siaran Radio itu dituduh telah menghasut rakyat supaya berontak. Mulai jam 8.30 hingga jam 9.00 lebih, datang dua bombers dan menjatuhkan bom-bom enam kali mengenai gedung Nillmy dan Sonobudoyo dan menembak dengan mitralyur di sekitar pabrik Watson, hingga menimbulkan korban 7 orang tewas dan puluhan luka-luka. Di antara korban-korban itu terdapat banyak perempuan dan anak-anak. Penduduk tidak sempat berlindung dan tidak ada perediaan perlindungan, tentara dan rakyat kita sengaja tidak mengadakan perlawanan. Rakyat memprotes keras terhadap perbuatan musuh yang melanggar peri kemanusiaan dan membabi buta berkedok alasan-alasan kosong. Hal ini diharapkan Presiden dan Perdana Menteri meneruskan kepada dunia Internasional terutama Rusia dan R.R.C., supaya mengetahui bahwa Inggris tidak dapat menjalankan kewajibannya dan supaya segera datang Rusia, Cina dan Amerika.”

Pada tanggal 27 - 11 - 1945 jam 13.00 pesawat-pesawat terbang Inggris mulai lagi membom kota Yogyakarta. Sebelum pemboman ini dilakukan, terlebih dahulu mereka menyebarkan pamflet-pamflet yang antara lain berisi :

”Pengeboman kami terhadap setasiun radio Yogyakarta pada pagi hari tanggal 25 Nopember yang baru lalu ini, kami tidak menghancurkan setasiun radio dengan secukupnya”.

”Berhubung dengan alasan-alasan yang telah kami siarkan lebih dulu, maka kami akan menghancurkan stasiun itu kembali”.

”Kami tidak akan mencिलakakan tuan-tuan sama sekali, kami hanya akan menyempurnakan penghancuran setasiun itu saja”.

”Tuan-tuan sudah diperingatkan adanya”

Demikianlah antara lain isi pamflet itu dan selanjutnya tidak lama kemudian, pada jam 13.30 datanglah empat buah bomber dan sebuah pemburu mengadakan pemboman dan mitralyur dengan membabi buta selama satu jam. Akibatnya Balai Mataram (Seni Sono sekarang) hancur dan banyak korban jatuh. Berhubung dengan kejadian itu maka Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX, segera mengirimkan kawat kepada Presiden Sukarno, yang berbunyi sebagai berikut :

”PYM Presiden Republik Indonesia Jakarta.

Selasa tanggal 27 - 11 - 1945 jam 13.00 - 14.40 siang beberapa kapal terbang Inggris membom kota Yogyakarta, Balai Mataram dan Senobudoyo hancur, kantor telepon dan Gedung C.H.T.H. dan beberapa rumah penduduk rusak sehingga menimbulkan korban di antara mereka. Memakai bom rocket dan torpedo, menyenjata dengan kanon dan miltrayur di mana-mana. Harapan kami memprotes sekeras-kerasnya dengan mengambil tindakan seperlunya.

Merdeka.

Hamengku Buwono. 4)

Sementara itu situasi makin bertambah panas dan tegang. Tindakan infiltrasi Belanda dengan NICA-nya makin merajalela. Keadaan dan kedudukan para pemimpin dan pembesar kita di Jakarta makin hari makin terancam.

Demikianlah pada tanggal 26 - 12 - 1945 terjadi percobaan pembunuhan terhadap P.M. Sutan Syahrir oleh NICA (beberapa orang serdadu Belanda). Usaha pembunuhan ini gagal sehingga selamatlah P.M. Sutan Syahrir.

Berhubung dengan kejadian itu, maka kedua Sri Paduka kemudian mengirimkan kawat kepada P.M. Sutan Syahrir, yang berbunyi sebagai berikut :

**”Paduka Perdana Menteri Sutan Syahrir Jakarta.**

Berhubung dengan terhindarnya Paduka Tuan dari bahaya yang mengancam, kami menghaturkan turut bergirang dan mendoa Paduka Tuan selamat sejahtera seterusnya”.

**Hamengku Buwono IX.**

**PYM P.M. Sutan Syahrir.**

Sangat terharu akan perbuatan-perbuatan yang keji terhadap Paduka, syukur alhamdulillah selamat.

**Paku Alam VIII.**

Di samping itu K.N.I. Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengirim kawat yang isinya sebagai berikut :

”Pemerintah Republik Indonesia Jakarta.

K.N.I. Daerah Yogyakarta mendesak kepada Pemerintah supaya mengambil tindakan yang tegas dan tepat atas penembakan pada dirinya P.M. Sutan Syahrir. Kejahatan itu sangat menimbulkan kemarahan rakyat, yang hingga kini ternyata dapat menahan hawa nafsunya, walaupun rakyat mempunyai kesempatan sepenuhnya untuk berbuat semacam itu misalnya terhadap van Mook, van der Plaas dan lain-lainnya.

**K.N.I. Yogyakarta.**

Demikianlah dengan makin bertambah gentingnya situasi di Jakarta, dan semakin terancamnya jiwa para pemimpin kita, maka pada tanggal 4 Januari 1946 ibukota pemerintah Republik Indonesia untuk sementara pindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Adapun mengenai alasan pemindahan sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Menteri Penerangan Ali Sostromojoyo SH. adalah sebagai berikut :

”Pemindahan ini tidak menjadi sebab untuk merobah pendirian pemerintah terhadap luar maupun dalam negeri. Pemindahan sementara ini beralasan dalam hal :

1. Keadaan tidak aman yang terdapat di Jakarta.
2. Untuk menyempurnakan organisasi dalam negeri.

Bahwa kota Jakarta pada masa ini makin lama makin tidak aman buat rakyat Indonesia umumnya buat pemimpin-pemimpin negara khususnya. Tidak perlu kami ceritakan panjang lebar lagi, cukuplah kiranya kami peringatkan tentang percobaan pembunuhan atas diri P.M. Syahrir dan terhadap saudara Amir Syarifudin SH, yang saudara-saudara tentu sudah maklum.

Siapakah yang menyebabkan tidak aman itu, tidak perlu kami terangkan lagi, meskipun dari pihak serikat katanya telah mengambil tindakan untuk mengendalikan teriris Belanda. Nyatalah bahwa keamanan pemimpin-pemimpin kita tidak dapat dijamin lagi. Akan tetapi sebetulnya lebih pentinglah alasan yang tersebut kedua tadi untuk memindahkan buat sementara kedudukan Pemerintah Agung. Alasan itu pada hakekatnya mengenai bagian yang penting daripada perhubungan kita, bahkan dari revolusi rakyat Indonesia pada masa ini.

Sebab pemerintah agung mulai sekarang dari kedudukannya yang baru, ialah kota Mataram akan dapat melangsungkan dengan lebih tepat dan cepat segala pimpinan dan usaha untuk menyempurnakan organisasi pemerintahan di daerah-daerah”.

Dengan pindahnya Pemerintah Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, maka segenap potensi perjuangan kita dapat terpusatkan. Sejak itu Yogyakarta merupakan ibukota Republik Indonesia dan dari sinilah disusun dan dihimpun segenap kekuatan untuk menanggulangi musuh. 5)

Situasi yang sudah diuraikan itu hanya sebagian saja dari situasi di Indonesia pada waktu itu. Sesungguhnya pada waktu itu dimana-mana di seluruh Indonesia terjadi pergolakan merealisasi dan mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai. Malahan di Yogyakarta sendiri terjadi perjuangan yang tidak kurang hebatnya tetapi yang dilakukan secara taktis di bawah

pimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sri Paku Alam VIII dan para pemimpin yang lain.

Dalam situasi yang sedemikian itu bagaimanakah sikap G.P. Puruboyo? Sikap beliau pada waktu itu kelihatannya (bukan kenyataannya) pasif saja, seolah-olah beliau tidak tanggap terhadap situasi yang menentukan nasib bangsa tersebut. Hal itu merupakan hal yang aneh, tetapi kalau ditinjau dengan cara yang lebih mendalam sebenarnya tidak merupakan hal yang aneh. Kelihatan aneh, karena beliau adalah seseorang yang cukup terpelajar dan pernah menjadi anggota badan-badan politik seperti Cuo Sangien, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, PPKI, dan pernah menjadi ketua Badan Pembantu Prajurit Tanah Air di Yogyakarta. Tetapi tidak aneh karena beliau oleh situasi yang dialami kelihatan aneh berpuluh-puluh tahun sebelumnya telah dicetak menjadi orang yang harus sangat berhati-hati dalam bidang politik. Sebagai pangeran, sejak kecil sampai tua beliau selalu hidup dalam pengawasan alat pemerintah kolonial. Kalau sedikit saja melanggar ketentuan yang sudah digariskan oleh pemerintah kolonial, beliau atau/dan ayahanda beliau dapat dihukum. Di samping itu, beliau berpendapat bahwa perjuangan tidak harus selalu dilakukan dengan jalan tampil dalam pemerintahan, tetapi perjuangan dapat dilakukan di mana saja, dengan wadah apa saja. Jika orang sudah bekerja keras sesuai dengan tanggung jawabnya dan dengan iktikat baik terhadap bangsa dan negara, berarti dia sudah berjuang dengan baik. Perjuangan tidak hanya membutuhkan tentara dan politikus tetapi membutuhkan juga petugas palang merah, petugas dapur umum, juru tulis dan sebagainya, demikianlah kata beliau.

Sesungguhnya, pada waktu itu BPH Puruboyo juga mempunyai kesibukan-kesibukan yang luar biasa, sebab beliau adalah anggota Komite Nasional Indonesia (sampai terbentuknya Kabinet Syahrir), pengageng (kepala) Kawedanan Kori di Kasultanan Yogyakarta, sebagai penasehat Komite Nasional Daerah, dan penasehat Komite Nasional Kecamatan Kraton Yogyakarta.

## 2. Aktif Dalam Bidang Politik Pada Jaman Orde Lama.

Sebagaimana kita ketahui, sebagai akibat dari dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 3 November 1945, lahirlah di Indonesia partai-partai yang makin lama makin banyak jumlahnya. Mula-mula partai-partai itu rukun-rukun saja, tetapi lama-kelamaan kerukunan itu menjadi hilang, dan yang terjadi adalah permusuhan.

Karena kecewa terhadap permusuhan yang terjadi di antara partai-partai, maka tokoh-tokoh yang terkenal sebagai "partijlozen" yaitu Mr. Wongsonegoro, Januismadi, Sewaka, G.P. Puruboyo dan tokoh-tokoh lain yang sehaluan mendirikan partai yang diberi nama Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR). Yang menyebabkan partai itu didirikan terutama karena para pendiri itu termasuk G.P. Puruboyo merasa prihatin melihat kenyataan pada waktu itu di mana bentrokan di antara partai-partai selalu terjadi dengan hebatnya, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi bahwa bentrokan yang mereka lakukan itu dapat menghancurkan Negara Republik Indonesia yang berdirinya sudah diperjuangkan dengan susah payah oleh bangsa Indonesia. Partai PIR bermaksud tampil sebagai partai teladan dalam pelaksanaan politik yang berdasarkan budi yang luhur supaya di dalam Negara Republik Indonesia dapat terwujud kerukunan nasional dan kesejahteraan lahir batin. Dalam partai yang baru itu G.P. Puruboyo mendapat kedudukan sebagai bendahara Dewan Pimpinan Partai (DPP).

Ketika DPP Partai PIR masih berkedudukan di Yogyakarta setiap hari G.P. Puruboyo selalu sibuk dengan urusan partai. Tetapi setelah tempat kedudukan DPP pindah ke Jakarta, dan sesudah pangeran tersebut berganti jabatan menjadi ketua buro kebudayaan merangkap wakil ketua buro pendidikan, maka beliau hanya kira-kira sebulan sekali menghadiri rapat DPP Partai PIR.

Dalam pemilihan umum tahun 1955 G.P. Puruboyo dicalonkan oleh partai PIR menjadi anggota Parlemen R.I.,

melalui daerah pemilihan Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara itu oleh DPP Partai PIR Daerah Istimewa Yogyakarta beliau juga dicalonkan menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pemilihan itu ternyata G.P. Puruboyo termasuk calon yang terpilih menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi tidak terpilih menjadi anggota Parlemen R.I.

Sesudah dengan resmi BPH. Puruboyo dilantik menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam sidang pertama dewan tersebut terjadi peristiwa yang menggambarkan bagaimana caranya para anggota Partai PIR termasuk G.P. Puruboyo berpolitik. Pada waktu itu fraksi yang terbesar dalam DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta adalah fraksi Masyumi dengan 18 orang anggota. Jumlah tersebut hampir separoh dari jumlah anggota, sebab jumlah anggota seluruhnya adalah 40 orang. Dengan demikian jika jumlah tersebut digabungkan dengan jumlah anggota fraksi Partai PIR yaitu dua orang, tercapailah jumlah 20 orang, yang berarti tepat separoh dari jumlah anggota seluruhnya. Rupanya kenyataan yang sedemikian itu menarik perhatian fraksi Masyumi. Hal itu terbukti dari tawaran yang diajukan oleh fraksi Masyumi kepada fraksi PIR agar PIR mau menerima kedudukan sebagai wakil ketua dengan dukungan Masyumi. Atas tawaran tersebut G.P. Puruboyo menjawab, bahwa kalau beliau menjadi wakil ketua berarti bahwa bertindak tidak adil, sebab fraksi lain yang lebih besar dari fraksi PIR masih ada beberapa buah. Menurut pendapat beliau pada waktu itu, berhak yang menduduki wakil ketua adalah anggota yang berasal dari fraksi terbesar kedua sesudah fraksi Masyumi.

Sesudah kira-kira satu tahun menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadilah perkembangan baru yang membawa G.P. Puruboyo kepada kedudukan yang lebih tinggi yaitu menjadi Parlemen R.I. Seperti yang sudah diuraikan di muka, pada tahun 1955 G.P. Puruboyo oleh Partai PIR dicalonkan menjadi anggota Parlemen R.I. melalui daerah pemilihan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika itu

nomornya dalam daftar calon adalah tiga, di mana nomor satu diduduki oleh Mr. Wongsonegoro dan nomor tiga diduduki oleh Ki Ageng Suryomataram. Sesudah ada penghitungan suara, calon PIR dalam daerah pemilihan Jawa Tengah/Daerah Istimewa Yogyakarta yang dinyatakan terpilih hanya satu yaitu Mr. Wongsonegoro. Tetapi, setelah selama satu tahun Mr. Wongsonegoro menjadi anggota Parlemen, beliau harus meninggalkan kedudukan beliau tersebut, sebab adanya peraturan yang mengatakan bahwa anggota Konstituante tidak boleh merangkap menjadi anggota Parlemen. Karena itu kursi di Parlemen yang didapat Partai PIR melalui daerah pemilihan Jawa Tengah /Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lowong. Untuk mengisi lowongan itu seharusnya Ki Ageng Suryomataramlah yang di dudukkan oleh partai PIR, sebab beliaulah yang menduduki urutan kedua dalam daftar pemilihan. Tetapi beliau tidak bersedia, dan memang beliau hanya bersedia dimasukkan dalam daftar pemilihan oleh Partai PIR sebagai vote getter saja. Dengan demikian maka kursi yang lowong itu diberikan kepada G.P. Puruboyo.

Pada waktu G.P. Puruboyo menjadi anggota Parlemen, kira-kira tahun 1958, di Parlemen berlangsung pembicaraan yang hangat mengenai enclave (kantong) Kasunanan dan Mangkunegaran yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pembicaraan tersebut ada dua anggota yang benar-benar aktif, yaitu Sudrasman (wakil PNI) dan G.P. Puruboyo. Akhirnya masalah kantong itu dapat diselesaikan dengan baik. Kantong Ngawen (milik Mangkunegaran) dimasukkan ke dalam Daerah Kabupaten Gunung Kidul, kantong Imogiri (milik Kasunanan) dimasukkan ke dalam Daerah Kabupaten Bantul, sedang kantong Kuta Gede (milik Kasunanan) sebagian dimasukkan ke dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta dan sebagian dimasukkan kedalam Daerah Kabupaten Bantul.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa karena fraksi PIR hanya merupakan fraksi kecil, maka fraksi ini bergabung dengan fraksi fraksi kecil yang lain yaitu fraksi Murba, Acoma, Parmusi, PRN dan sebagainya menjadi fraksi Nasional Progesif.

Kemudian, setelah apa yang disebut "partai gurem" tidak diberi kesempatan oleh Pemerintah, maka Partai PIR terpaksa membubarkan diri. Bubarnya Partai PIR diikuti oleh hilangnya kursi partai tersebut di Parlemen. Dengan demikian G.P. Puruboyo pun berhenti dari kedudukannya sebagai anggota Parlemen.

Setelah tidak lagi menjadi anggota Parlemen, G.P. Puruboyo hanya aktif di Kraton sebagai pengageng Kawedanan Kori. 7).

### **3. Kegiatan Pada Era Pembangunan.**

Pada tahun 1965 bangsa Indonesia telah mulai memasuki era baru dan salah satu cirinya ialah pelaksanaan pembangunan secara berencana dan realistis di dalam semua bidang kehidupan. Demikianlah setelah kekuatan-kekuatan Orde Baru (Orba) berhasil menggagalkan pemberontakan G.30S/PKI, maka pengaturan kehidupan di bidang politik makin berkembang kearah yang lebih baik. Dalam hubungan ini, salah satu kekuatan politik yang bertumbuh dengan baik itu ialah Sekber Golkar. Organisasi golongan karya ini berhasil menjawab tantangan menegakkan Orde Baru; sebab golongan-golongan fungsional itu mendasarkan perjuangannya pada Pancasila dan UUD 1945 serta mengabdikan diri pada pembangunan nasional. Sejak waktu itu Sekber Golkar melanjutkan konsolidasinya dan meluaskan dirinya, sehingga pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II Sekber Golkar pada tanggal 2-7 Nopember 1967, Sekber Golkar terdiri dari 291 organisasi fungsional. Sementara itu telah dilakukan usaha-usaha untuk membersihkan Sekber Golkar dari organisasi-organisasi fungsional yang berafiliasi pada partai politik. Mukernas II yang diselenggarakan dengan tema "Konsolidasi Sekber Golkar bagi berhasilnya Kabinet Ampera dan kemenangan Orde Baru menuju Masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945" merupakan langkah yang penting karena mulai mempermasalahkan persiapan Pemilihan Umum 1971. Mengingat hal itu, Mukernas ini menugaskan kepada pengurus yang dipilih untuk melaksanakan

penyederhanaan organisasi Sekber Golkar itu dalam waktu enam bulan untuk dapat meningkatkan efisiensinya.

Usaha itu ternyata sulit dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan yang ditentukan. Didirikannya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dalam tahun 1968 itu merupakan bantuan bagi usaha pengurangan jumlah organisasi fungsional dalam Sekber Golkar, karena 13 organisasi, antara lain Muhammadiyah, Gasbundo, HSBI dan Nadhatul Wathan, melepaskan diri dari Sekber Golkar untuk bergabung dalam partai baru itu. Demikian pula organisasi-organisasi fungsional yang bersifat lokal digabungkan dalam Sekber Golkar setempat, sehingga jumlah organisasi-organisasi fungsional dalam Sekber Golkar tingkat pusat menurun hingga 201 buah. Dalam tahun 1968 itu juga pengurus Sekber Golkar berhasil menyederhanakan jumlah tersebut menjadi 17 organisasi pilar. Usaha penyederhanaan berjalan terus, dan akhirnya dalam tahun 1969 melalui Keputusan No. 107/1969 Pengurus Pusat Sekber Golkar memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk melaksanakan konsolidasi selanjutnya. Dengan Keputusan Ketua Umum No. 507/1969 Sekber Golkar dikelompokkan menjadi tujuh Kelompok Induk Organisasi (Kino), yakni Soksi, Kosgoro, MKGR, Gakari, Profesi, Ormas Hankam, dan Gerakan Pembangunan. Selanjutnya dengan Keputusan Ketua Umum No. 807/1969 ke 201 organisasi fungsional dilebur ke dalam tujuh Kino tersebut yang selanjutnya menjadi golongan-golongan profesi menjelang Pemilihan Umum 1971, dan akhirnya Golongan Karya telah muncul dengan satu tanda gambar saja.

Bersamaan dengan perkembangan Golongan Karya dalam masyarakat banyak dipersoalkan apakah perubahan struktur politik harus dilakukan sebelum atau setelah pemilihan umum. Tetapi harus diakui bahwa tumbuhnya Golongan Karya mencapai bentuknya seperti yang terlihat sekarang ini justru telah menandai awal suatu perubahan struktur politik, sebab Golongan Karya merupakan satu-satunya kekuatan sosio-politik di luar pengkotak-kotakan ideologi berdasarkan Nasakom, dan

hanya berdasarkan ideologi Pancasila. Golongan Karya merupakan satu-satunya kekuatan sosio politik yang berorientasi pada program pembangunan, dan satu-satunya yang mampu mempersatukan kelompok-kelompok fungsional yang bermacam-macam ragam di bawah satu tanda gambar dalam pemilihan umum. 8)

Pada tahun 1971 G.P. Puruboyo mulai terlibat dalam kegiatan Golkar, sebab beliau terpilih menjadi anggota DPR sebagai wakil dari Golkar. Hal ini berarti bahwa beliau mendapat kepercayaan yang besar dari Golkar dan dari para pemilih atau rakyat. Ternyata beliau tidak menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Selama menjadi anggota DPR beliau selalu menghadiri sidang - sidang yang seharusnya dihadiri oleh para anggota. Berbicara dalam sidang pleno beliau memang tidak pernah, sebab menurut ketentuan yang berlaku, yang dapat berbicara dalam sidang pleno hanya para juru bicara fraksi padahal beliau bukan juru bicara fraksi.

Selama G.P. Puruboyo menjadi anggota DPR dari tahun 1971 sampai tahun 1977 berlaku ketentuan dalam DPR, bahwa pada waktu-waktu reses para anggota diwajibkan mempunyai kesibukan yang berguna bagi kemajuan desa. Karena adanya ketentuan tersebut setiap ada reses G.P. Puruboyo selalu datang ke desa-desa di Gunung Kidul. Selama menjadi anggota DPR (1971 - 1977) beliau sudah "menggarap" tidak kurang dari 80 buah desa. Yang menjadi sasaran penggarapan beliau yang terutama adalah administrasi. Kegiatan tersebut ternyata tidak sia-sia. Karena kegiatan tersebut (tetapi juga berkat bimbingan Pemerintah), sejak tahun 1971 administrasi di desa-desa Kabupaten Gunung Kidul berangsur-angsur menjadi baik. Kecuali administrasi, kegiatan pariwisata di pantai selatan Gunung Kidul juga menjadi sasaran "penggarapan" nya, sebab ia berpendapat bahwa pariwisata harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan dana bagi negara dan daerah bersangkutan. 9)

Dalam pemilihan umum tahun 1977 G.P. Puruboyo juga dicalonkan oleh Golkar lagi, tetapi beliau tidak terpilih menjadi anggota DPR, hanya terpilih menjadi anggota MPR. Sampai

buku ini ditulis beliau masih tetap anggota MPR.

Sementara itu, seperti biasanya, beliau tetap berkedudukan sebagai pengageng Tepas Dworopuro, pengageng Kawedanan Ageng Punakawan Widyobudoyo, dan pengageng Tepas Pariwisata.

Tepas (kantor) Pariwisata mempunyai kira-kira 70 orang guide. Sebagian dari guide itu adalah untuk para wisatawan domestik, sedang sebagian lainnya adalah guide untuk para wisatawan asing. Sebelum diangkat secara resmi menjadi guide, para calon guide diwajibkan mempelajari masalah kraton dan semua peninggalan yang terdapat di dalamnya. Kegagalan dalam tes saringan yang diadakan sesudah para calon diberi kesempatan belajar seperti tersebut di atas, berakibat penundaan pengangkatan. Dengan demikian semua guide yang bekerja di Kraton Kasultanan Yogyakarta adalah guide yang menguasai profesinya. Dalam pada itu, para guide untuk para wisatawan asing diwajibkan menguasai bahasa asing, minimum bahasa Inggris. Dalam kenyataannya, banyak guide untuk para wisatawan asing itu yang tidak hanya menguasai bahasa Inggris tetapi juga menguasai bahasa asing yang lain, misalnya bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Belanda, atau bahasa Jepang. Malahan ada di antara mereka yang menguasai semua bahasa yang sudah disebutkan itu yaitu Ibu Narimah yang merupakan guide yang tertua (60 tahun). Para guide anak buah G.P. Puruboyo itu mendapat penghasilan sesuai dengan kegiatan masing-masing. Adapun honorarium yang diberikan kepada para guide tersebut diambilkan dari dana yang diperoleh Tepas Pariwisata dari para wisatawan. Menurut informasi G.P. Puruboyo, setiap bulan Juni, Juli atau Agustus biasanya Tepas Pariwisata dapat memperoleh dana sebesar lima atau enam juta rupiah. 10)

Demikianlah gambaran pelbagai hal yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan G.P. Puruboyo di dalam masa kemerdekaan.

## P E N U T U P

Setelah mengikuti perjalanan hidup G.P. Puruboyo, kita mendapat kesan, bahwa tokoh ini adalah tokoh yang lugu, jujur, lugas, dan ramah tamah. Kecuali itu, meskipun ia seorang bangsawan tinggi, putera raja, tetapi dalam pergaulan dengan orang-orang kebanyakan tidak pernah bersikap meremehkan, malah dapat dikatakan sangat sopan dan menyenangkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecuali seorang bangsawan dalam keturunan juga seorang bangsawan dalam budi dan pekerti.

Mungkin karena budi pekerti yang demikian itu maka ia merasa sesuai berada dalam Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) yang sepak terjangnya berdasarkan budi luhur. Tetapi sayang, pada waktu partai itu muncul (1948) dan mulai berkembang situasi dan kondisi yang terdapat dalam masyarakat Indonesia belum mengizinkan; karena itu partai ini tidak dapat hidup subur. Pada tahun 1961 PIR terkena tindakan Pemerintah dalam rangka usaha penyederhanaan jumlah partai khususnya tindakan penghapusan dari apa yang disebut "partai gurem". Tetapi dalam jaman Orde Baru G.P. Puruboyo mendapat wadah perjuangan yang baru yang menurut pandangannya juga sangat menekankan perlunya budi luhur dalam perjuangan politik seperti halnya Partai PIR. Wadah baru itu adalah Golongan Karya (Golkar).

Pada tahun 1971 - 1977 dengan kedudukan resmi sebagai anggota Parlemen R.I. atas nama Golkar G.P. Puruboyo telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Kemudian, meskipun sudah cukup tua, sejak tahun 1977 ia masih pula bersedia bekerja untuk negara dan bangsa dengan kedudukannya sebagai anggota MPR atas nama Golkar.

Demikianlah nampak bahwa jasa G.P. Puruboyo pada negara dan bangsa cukup besar. Apalagi kalau kita mengingat bahwa adalah salah seorang di antara tokoh-tokoh yang dengan kedudukan sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah mempersiapkan berdirinya Negara Republik Indonesia, maka ia termasuk tokoh yang harus mendapat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari bangsa Indonesia.

Akhirnya perlu ditambahkan di sini bahwa G.P.Puruboyo pada masa mudanya mempunyai hobby bermacam-macam olah raga, yaitu sepak bola, tenis, hockey, badminton, dan pingpong, sehingga meskipun sudah tua, tubuh beliau masih kelihatan segar dan bertenaga. Kegemarannya yang lain yang perlu disebutkan di sini adalah bermain kartu, bridge, charite, pehi, kartu wolu dan catur, yang semuanya bukan untuk berjudi, tetapi untuk olah raga otak. Dengan demikian, karena selalu melakukan olah raga fisik dan otak, terbentuklah harmoni yang baik pada dirinya.

## DAFTAR CATATAN

### CATATAN BAB I.

1. K.R.T. Mondoyokusumo, Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat (Yogyakarta Bebadan Museum Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, 1976) hal. 65 - 69.
2. Wawancara dengan G.P. Puruboyo.

s

### CATATAN BAB. II.

1. Wawancara dengan G.P. Puruboyo dan K.P.H. Tirtodiningrat (Jl. Jendral Sudirman Yogyakarta).
2. Wawancara dengan G.P. Puruboyo.
3. Ibid.
4. Informasi dari R.A. Maharkesti. Jl. Cik Di Tiro 6A, Yogyakarta.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Wawancara dengan G.P. Puruboyo.

### CATATAN BAB III.

1. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notokusanto, Sedjarah Nasional Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1977), VI, hal. 5 - 10).
2. Ibid, hal. 10 - 11; Wawancara dengan G.P. Puruboyo.
3. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notokusanto, Op. cit, hal. 11 - 15.
4. Prof. Dardji Darmodiharjo, SH. dkk, Santiaji Pancasila (Surabaya, Usaha Nasional, 1979), hal. 11 - 15.
5. Pendidikan Moral Pancasila (Jakarta.P.T. Gita Karya, 1977), I, hal. 31 - 33.

#### CATATAN BAB IV.

1. Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1977), VI, hal. 29 - 32.
2. Ibid. 32 - 34.
3. Ibid. 34 - 35.
4. Drs. Tashadi, dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 - 1949) Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Dasar, 1980), hal. 122 - 125.
5. Ibid, hal. 125 - 127.
6. Wawancara dengan G.P. Puruboyo Dr. A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (Bandung, Angkasa, 1979), VIII, hal. 73 - 74.
7. Wawancara dengan G.P. Puruboyo, K.P.H.S. Poerwokoesoemo, SH, R.W. Koesoemobroto dan Sudrasman.
8. Ali Moertopo, *Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta, Yayasan Proklamasi, 1981), hal. 196 - 122.
9. Wawancara dengan G.P. Puruboyo.
10. Wawancara dengan G.P.Puruboyo,G.B.P.K.H. Prabuningrat, dan K.P.H.S. Poerwokoesoemo, SH.

## DAFTAR INFORMAN

KOESOEMOBROTO, R.W. Jayaningprangan 17 Yogyakarta.

MAHARKESTI, R.A. Jl. Cik Di Tiro 6A, Yogyakarta.

POERWOKOESOEMO, K.P.H. Soedarisman, Jl. K.H. Ahmad Dahlan 4 Yogyakarta.

PURUBOYO, G.P. Jl. Panembahan Yogyakarta.

SOEDRASMEN, Jl. K.H. Ahmad Dahlan 4, Yogyakarta.

SOEDOMO, B.A. Jl. Patuk Yogyakarta.

TIRTODININGRAT, K.P.H. Jl. Jenderal Sudirman Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damodihardjo, Dardji, dkk. Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, 1979.
- Dimodiningrat, KRT "Sejarah Perkembangan Pemerintah Kota-pradja Jogjakarta", Panitia Peringatan Kota Yogyakarta 200 tahun (Oktober 1956).
- Gottschalk Louis, Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
- Hanifah, Abu M.D. Renungan Perjuangan Bangsa Dulu dan Sekarang, Jakarta Yayasan Idayu, 1978.
- Kansil C.S.T. dan Julianto Sa, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia.
- Kepartaian di Indonesia, Jakarta, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1950.
- Katodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI, Jakarta, Balai Pustaka 1977.
- Koesoemo, SH, Riwayat Perkembangan Kebudayaan Daerah Jogjakarta 200 tahun (Oktober, 1956).
- Mondoyokusumo, KRT, Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat, Babadan Museum Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, 1976.
- Moertopo, Ali, Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, Yayasan Proklamasi, 1981.
- Pendidikan Moral Pancasila, Jakarta, P.T. Gita Karya, 1977.
- Pitono, R. Nyoman Dekker, dan Mugiono, Sedjarah Indonesia, Djilid III, Malang, Penerbit Utama, 1970.
- Pringgodigdo, A.K. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Jakarta Penerbit Dian Rakyat, 1977.
- Strategi Dasar Era Pembangunan 25 Tahun, Bandung, C.V. Sumadjaya, 1973.
- Susanto Tiroprodjo, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, Jakarta, P.T. Pembangunan, 1970.

## Lampiran I

### PARTAI PERSATUAN INDONESIA RAYA \* (PARTAI P.I.R.)

#### 1. Riwayat singkat.

Beberapa bulan sebelumnya Militaire actie II, maka di Yogyakarta terbentuklah : Partai Persatuan Indonesia Raya yang berjiwa : Nasional dan Demokratis.

Menurut statement yang pada tanggal 10 Desember 1948 dikeluarkannya maka sebagian besar dari Rakyat kita belumlah memajukan, memperkenalkan serta mengembangkan cita-citanya dalam memperjuangkan nasib bangsa Indonesia sehingga susunan pemerintah dan perwakilannya belumlah merupakan badan-badan yang representatif.

Di dalam persiapan dan selanjutnya untuk membentuk Negara Indonesia Serikat, maka seharusnya ada kerja sama yang erat di antara seluruh Rakyat Indonesia.

Pada hakekatnya di dalam memperjuangkan dan mempertahankan nasib bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya dalam Negara Indonesia Serikat tak adalah suatu perbedaan cita-cita di antara nasionalis federal dan nasionalis Republik.

Maka dari sebab itu hendaknyalah diusahakan adanya perhubungan dengan rakyat yang berada di luar daerah yang dikuasai oleh Republik sekarang ini, supaya terlaksanalah suatu kerja sama yang erat.

Untuk jelasnya, maka di bawah ini terdapatlah statement yang lengkap :

#### Statement :

Kami,

Yakin, bahwa tiap-tiap patriot Indonesia, di mana juga ia berada, sesuai dengan faham dan pengetahuannya masing-masing, sadar akan kewajibannya dan bersedia turut serta mem-

---

\*) Lampiran ini diberikan karena G.P. Puruboyo adalah salah seorang tokoh terpenting dari partai P.I.R.

pertahankan mengisi cita-cita kemerdekaan, yang telah menyatakan dengan Proklamasi Kemerdekaan, Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai lambang pernyataan kemauan bangsa yang bulat untuk membantu mewujudkan kesempurnaan dan perdamaian dunia umumnya;

Sadar akan kenyataan bahwa masih terdapat sebagian rakyat yang tidak/atau belum memajukan, memperkenalkan serta mengembangkan cita-cita dalam memperjuangkan nasib bangsa Indonesia;

Berpendapat, bahwa segenap tenaga rakyat pertama-tama harus ditujukan kepad terwujudnya cita-cita nasional yang meliputi seluruh bangsa kita dengan dasar demokrasi yang sesuai dengan keadaan dan jiwa masyarakat Indonesia yang sesungguhnya;

Berpendapat pula, bahwa pertentangan di dunia sekarang ini, yang menunjukkan suatu krisis dalam sejarah manusia, dapat di hadapi terutama dengan kepercayaan atas diri pribadi berpegang teguh pada Panca Sila sebagai pedoman hidup bersama disertai dengan perkembangan jiwa budaya menurut bakatnya sendiri, dan dengan turut serta memberi sumbangan untuk keselamatan dunia;

Dengan ini membentuk organisasi dengan nama : **PER-SATUAN INDONESIA RAYA** yang berjiwa nasional dan demokratis, mempunyai tugas bekerja secara efektif dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap seluruh bangsa Indonesia dengan program perjuangan yang tertentu.

## Lampiran II.

### PENJELASAN TENTANG AZAS \* DARI PARTAI "PERSATUAN INDONESIA RAYA"

#### II. A Z A S (Pasal 2)

Partai berdasarkan faham : 1. Kebangsaan, 2. Kerakyatan dan 3. Peri Kemanusiaan.

##### 1. Kebangsaan.

Kita memakai faham kebangsaan lantaran itu adalah satu sendi persatuan dengan mana dapat diikat persatuan yang erat dan kokoh antara semua orang yang menurut sejarah dan keadaan alam (geografie) berasal dari satu bangsa dan berdiam di atas satu kesatuan tempat tumpah darah tanah air mereka di mana satu bahasa menjadi bahasa dari semua rakyat yang mempunyai sifat umum satu dan berkepentingan satu, keluar dan kedalam.

##### 2. Kerakyatan.

- a. Kita memakai faham kerakyatan sebagai azas dari Partai kita sebagai perjuangannya, sebab kita yang membangun Partai ini, berpendapat bahwa suara pendirian dari Partai ini bersandar kepada faham, bahwa setiap manusia di atas bumi harus sama haknya dan mempunyai suara yang umumnya sama harganya. Umpamanya menentukan garis besarnya dasar-dasar penghidupan, dengan ketetapan bahwa suaranya orang terbanyak dalam satu golongan masyarakat atau satu negara harus menentukan pendirian dan kemauan mereka itu. Tetapi pendirian dan kemauan itu tentulah dapat dipengaruhi dan dipimpin kesatu arah, menurut ajuan anggota masyarakat yang tercapak, terpelajar, terlebih pengalaman atau istimewa, terlalu memikirkan soal-soal yang diperbincangkan formil suara mereka adalah masing-masing sama dengan tiap-tiap suara dari anggota masyarakat biasa tetapi sebenarnya mereka

---

\*) Lampiran ini diberikan untuk memperoleh gambaran tentang landasan-landasan perjuangan partai P.I.R., di mana G.P. Puruboyo merupakan tokoh penting bahkan salah seorang pendiri.

itu dapat mempunyai suara lebih banyak (defacto). lantaran dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti suaranya. Dan oleh sebab itu juga pimpinan-pimpinan pekerjaan diserahkan kepada mereka untuk membawa masyarakat kearah satu tujuan yang dianggap akan membawa kebahagiaan buat masyarakat. Meskipun begitu kalau anggauta terbanyak dari masyarakat atau golongan menganggap pimpinan itu tidak bijaksana maka perlulah pimpinan mengubah sikapnya atau menyerahkan pimpinan kepada lain-lain orang yang mendapat kepercayaan dari orang banyak.

- b. Tetapi ini tidaklah berarti bahwa anggauta-anggauta terbanyak setiap waktu berhak menyingkirkan atas pimpinan, kalau anggauta-anggauta itu (dari satu golongan, masyarakat atau negara) merasanya perlu Demokrasi (kerakyatan) mengizinkan tiap-tiap orang bersuara dan mengeluarkan pendapatnya dalam satu masalah masyarakat, tetapi segala-galanya harus menurut peraturan dan waktu.

Orang-orang yang besar menginsyafkan kedaulatan Rakyat (demokrasi) tahu bagaimana dan kapan dapat atau harus mengeluarkan kritiknya atau pendapatnya. Satu kepala negara (presiden) yang sudah dipilih oleh rakyat dalam negara demokrasi, tidak dapat pada tiap-tiap waktu (sebelum waktu berhentinya, yang ditetapkan dalam undang-undang dasar disuruh berhenti, lantaran rakyat tidak menyukainya. Kalau Presiden itu tidak disukai pimpinannya oleh bagian besar dari rakyat, maka ini dapat kenyataan kelak pada waktu pemilihan baru dari Kepala negara. Presiden yang tidak disukai pimpinannya tidak akan dipilih lagi oleh rakyat.

- c. Kalau rakyat tidak menyetujui pemerintah daerah lantaran pimpinannya tidak bijaksana, maka rakyat tidak memecatnya sendiri, tetapi rakyat perlu melaporkannya

kepada wakil-wakil rakyat dan wakil-wakil rakyat itu harus memajukan soal ini kepada pemerintah pusat (atau langsung kepada pemerintah pusat) yang akan bertindak dengan kebijaksanaan menurut keadaan, tempat dan waktu. Selanjutnya kalau ada satu kabinet pemerintahan pada suatu waktu sudah mendapat kepercayaan (penuh) dari bagian terbesar dari Badan Perwakilan Rakyat, maka haruslah kabinet itu mendapat kesempatan yang leluasa untuk menjalankan pemerintahan menurut kebijaksanaan semuanya tentu dengan berkewajiban untuk memberi pertanggungjawaban pada suatu waktu yang dianggap baik guna kepentingan negara dan pemerintahan, dan kalau tidak mendapat kepercayaan atas pertanggungjawabannya itu, harus meletakkan jabatannya. (demokrasi parlementair).

Dan bukanlah sama sekali maksudnya kedaulatan rakyat, bahwa pimpinan dari satu negara atau satu organisasi harus meminta persetujuan dulu dengan badan perwakilan buat tiap-tiap pekerjaan yang hendak dikerjakan.

### **3. Peri kemanusiaan.**

Tetapi kita berpendapat juga, bahwa kita tidak akan menghargai atau menghormati satu hasil dari suara orang terbanyak, kalau hasil itu didapat dengan jalan yang melanggar peri kemanusiaan atau melampaui batas dari kepatutan meskipun kiranya resmi hasil itu adalah menurut peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dari sebab itu meskipun Partai ingin mencapai kemajuan dalam perjuangannya dan kemajuan itu dapat memberi kesempatan kepada Partai untuk mendapat kemenangan politik suara terbanyak dalam turut memegang kekuasaan pemerintahan, yang sendirinya dapat memajukan partai lagi, tetapi Partai hanya ingin menempuh jalan yang suci dan murni dan sekali lagi menolak perjuangan yang bersandar kepada kekerasan dan segala perbuatan yang melanggar peri kemanusiaan.

Sebab perbuatan-perbuatan itu mungkin pada waktu yang pendek dapat memberi kemajuan dan kemenangan dalam segala lapangan, tetapi lambat laun semuanya itu akan hilang akhirnya, sebab tidak suci dasar dan pokoknya dan sendirinya memuat racun dalam badannya sendiri.

Biarlah Partai ini lambat mendapat kemajuan dan mencapai kemenangan politik, asal saja perjalanan sehat dan dengan itu dapat hidup subur dan abadi. Dan ini hanya bisa kalau di dalam segala-galanya organisasi ini bersih.

Bersih keluar dan bersih ke dalam, berjalan dalam garis kemanusiaan. Moga-moga atas dasar itu partai kita dapat berumur lama dan berjalan terus. Fahaman kemanusiaan mengandung arti yang luas, di antaranya terbayang di dalamnya keadaan keamanan yang menurut fahaman kita sendiri, adalah syarat mutlak guna menjamin cita-cita demokrasi di kalangan rakyat. Juga di dalamnya ada fahaman persaudaraan dan kekeluargaan.

Dan tidak saja berlaku terhadap bangsa sendiri tetapi juga terhadap bangsa lain (internasionalisme).

Malahan mengandung bibit selainnya demokrasi dalam lapangan sosial, juga demokrasi dalam lapangan ekonomi, ialah kesejahteraan sosial, yang hanya dapat terlaksana kalau manusia sudah benar dan teguh memegang azas perikemanusiaan.

### **III. ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 1.**

#### **Nama dan tempat kedudukan.**

Partai bernama "Persatuan Indonesia Raya" (atau disingkat P.I.R.) dan berkedudukan di tempat kedudukannya Dewan Pimpinan Pusat.

## **Pasal 2.**

### **A z a s**

Partai berdasarkan faham : Kebangsaan, Kerakyatan dan Peri Kemanusiaan.

## **Pasal 3.**

### **T u j u a n**

Tujuan Partai ialah :

1. Menyempurnakan dan mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Nasional Indonesia.
2. Mewujudkan suatu Susunan Negara Demokratis yang meliputi seluruh Bangsa dan Tanah Air Indonesia.
3. Mewujudkan keadilan Sosial dan perkembangan jiwa budaya menurut bakatnya Rakyat sendiri, dalam Negara dan Masyarakat Indonesia.
4. Mengeratkan kerja sama dengan bangsa-bangsa lain, terutama dengan bangsa-bangsa yang mempunyai kepentingan amat bertalian dengan bangsa kita, selanjutnya turut serta memberi sumbangan untuk keselamatan Dunia.

## **Pasal 4.**

### **U s a h a**

1. Memperbesar keinsyafan dan keyakinan Rakyat atas tenaga sendiri.
2. Memperbesar keyakinan Rakyat untuk menjalankan perjuangan dengan berpedoman kejujuran, gotong-royong dan solidaritet.
3. Berpegang teguh kepada semboyan dan faham : "The right man on the right place".
4. Memberikan dan menganjurkan pemberian penjelasan-penjelasan yang tepat menurut cara yang gampang buat umum.

5. Mengajukan terus supaya Pemerintah dan Masyarakat dalam segala-galanya bekerja sistymatis dan organisatoris.
6. Mengerjakan segala usaha yang tidak bertentangan dengan Pemerintah, baik yang sudah tertentu ditetapkan dalam program Partai, maupun usaha-usaha diluar Program itu yang dianggap perlu oleh Dewan Partai.

#### **Pasal 5.**

##### **Anggauta.**

1. Tiap Warga Negara yang telah berumur 18 tahun ke atas (dewasa) boleh diterima sebagai anggauta.
2. Anggauta Partai ini tidak boleh anggauta dari Partai Politik manapun dan sebaliknya anggauta dari Partai Politik lain tidak boleh diterima sebagai anggauta dari Partai ini.

#### **Pasal 6.**

##### **Susunan Perhimpunan.**

1. Partai dipimpin oleh satu Dewan Partai terdiri atas seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, atau Sekretaris Jendral dan beberapa anggauta Dewan yang masing-masing mendapat kursus dari Dewan (saksi).
2. Pimpinan Harian dari Partai dipegang oleh Ketua atau Wakilnya, dan Sekretaris Jendral, dan seorang anggauta.
3. Dalam daerah administratif yang melingkungi beberapa Karisidenan, diadakan Komisariat daerah sebagai wakil dari Dewan Partai.
4. Cabang dan Ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang dan Pengurus Ranting.

#### **Pasal 7.**

##### **Kekuasaan Tertinggi.**

Kongres mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Partai  
Susunan Dewan Partai ditetapkan oleh Kongres.

### **Pasal 8.**

#### **Konggres.**

Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 tahun Partai mengadakan Konggres yang dihadiri oleh utusan-utusan Tjabang dan Pimpinan oleh Dewan Partai.

### **Pasal 9.**

#### **Cabang dan Ranting-ranting.**

1. Di tiap-tiap Daerah Kabupaten atau daerah yang sederajat dengan daerah tersebut, diadakan Cabang.
2. Ranting diadakan di tiap-tiap tempat lingkungan di bawahnya yang beranggota sekurang-kurangnya 30 orang.

### **Pasal 10.**

#### **Harta benda.**

Harta benda Partai terdiri dari uang Pangkal dan uang iuran anggota serta pendapatan-pendapatan yang lain yang halal.

### **Pasal 11.**

#### **Anggaran Rumah Tangga.**

Aturan-aturan Partai yang lain lebih lanjut dimuat dalam anggaran Rumah Tangga, anggaran mana tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

### **Pasal 12.**

#### **Ketentuan Umum.**

1. Hal yang tidak ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Partai.
2. Segala perselisihan dalam memahamkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Partai.

3. Putusan tentang Anggaran Rumah Tangga kemudian pengesahan Kongres.

### **Pasal 13.**

#### **Perwakilan Partai kedalam dan keluar.**

Yang mewakili Partai ke dalam dan ke luar ialah ketua Dewan Partai atau Wakil atau orang lain yang mendapat kuasa istimewa untuk itu.

### **Pasal 14.**

#### **Perubahan Anggaran Dasar.**

Perubahan Anggaran Dasar harus ditetapkan oleh Kongres. Kongres tersebut boleh dilangsungkan bilamana anggauta yang hadir mewakili  $\frac{3}{4}$  jumlah anggautanya seluruhnya dan putusan untuk mengubah Anggaran Dasar hanya dapat diambil jika  $\frac{2}{3}$  jumlah anggauta yang hadir menyetujuinya.

## **IV. PROGRAM**

### **1. Bagian Politik.**

#### **a. DALAM NEGERI**

1. Memperkembangkan pergaulan-pergaulan hidup (rechts-gemeenschappen) Bangsa kita dengan keadaan hidupnya sebagai bahan permulaan dalam menyusun Negara dan Pemerintahan yang demokratis, serta dalam pembangunan Bangsa Indonesia pada umumnya, secara sosial, kulturil, ekonomis, dan sebagainya.
2. Memperhebatkan serta menyempurnakan proses kesatuan Bangsa Indonesia.
3. Mengusahakan serta melaksanakan hak - hak dan kebebasan-kebebasan Dasar Manusia, seperti tercantum di dalam Universal Declaration of Human Rights.

## **b. LUAR NEGERI.**

Menjalankan sesuatu atas kepercayaan diri sendiri dengan berdasar atas keadaan Negara dan Masyarakat serta cita-citanya memperkembangkan Peri Kemanusiaan sejati.

### **2. Bagian Sosial.**

- a. Mengusahakan pemindahan tenaga dari daerah-daerah yang padat dengan penduduk ke daerah-daerah kosong (transmigrasi), untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberi mata pencaharian sebagai satu langkah dalam pemberantasan pengangguran, untuk mencapai kesejahteraan untuk seluruh Indonesia.
- b. Memperjuangkan secara parlementer untuk dapat berlakunya fasal 27 ayat 2 dan fasal 33 UUD Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia.
- c. Melaksanakan Undang-undang Sosial buat buruh yang mengenai upah minimum, banyaknya jam bekerja dalam satu minggu, serta adanya peraturan-peraturan yang mengenai perjanjian kolektif antara majikan dan sarikat sarikat buruh sebagai satu usaha dalam memperbaiki nasib buruh.
- d. Meminta perhatian Pemerintah dengan bukti yang nyata tentang perbaikan nasib para Invaliden, dan bantuan kepada Korban Perjuangan, tidak saja dari kalangan tentara, tetapi juga dari kalangan sipil.
- e. Mengusahakan berdirinya rumah-rumah sosial untuk memberi perawatan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan lain-lain.

### 3. Bagian Pendidikan.

- a. Berusaha supaya "Kewajiban Belajar" secepat mungkin diatur dengan Undang-Undang R.I.S.
- b. Membantu memberantas buta huruf.
- c. Berusaha supaya pendidikan guru-guru diperluas dan mutu guru-guru dipertinggi.
- d. Membantu perkembangan Perguruan-perguruan tinggi sebagai Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.
- e. Berusaha supaya dalam pendidikan tidak saja diutamakan pendidikan kepandaian dan kecerdasan tetapi juga pendidikan watak, jiwa kejujuran, perasaan tanggung jawab dan pengabdian terhadap masyarakat.
- f. Berusaha supaya semua sekolah Negeri berjiwa Nasional dan supaya secepat mungkin bahasa Indonesia menjadi satu-satunya bahasa pengantar.

### 4. Bagian Perekonomian.

- a. Pada azasnya politik ekonomi asli Indonesia haruslah menuju kearah ekonomie teratur dalam waktu secepat-cepatnya. Apabila suatu "Plan" bulat belum mungkin, seharusnya sekarang juga dibuatnya beberapa aturan dan rencana tertentu bagi beberapa bagian.  
Dalam sesuatu rencana ekonomi teratur di Negara kita, yang berdasarkan demokrasi, seharusnya element paksaan sedapat mungkin diperkecil.
- b. Kebutuhan rencana bagian-bagian ekonomi antara lain hendaknya mengenai :
  1. memperbesar frekwensi lalu lintas sebanyak-banyaknya, dalam waktu yang pendek.
  2. diskriminasi yang sengaja atau tidak timbul sewaktu zaman pendudukan Belanda dan merugikan orang-orang Indonesia, haruslah segera diganti dan dipulihkan ke arah "prioriteit" nasional.
  3. hendaknya diusahakan terselenggaranya kontrak-kontrak kolektif disemua perusahaan besar, agar

pemogokan-pemogokan tidak lagi terjadi dan produksi dapat berjalan cepat dan lancar.

4. hendaknya dengan segera dipercepat adanya uang R.I.S. baru.

## 5. Bagian Kebudayaan.

a. Kebudayaan harus diperbaharui atas dasar-dasar pokok :

1. Membimbing jiwa budaya Indonesia kearah perkembangan Nasional seluruh Indonesia.
2. menerima kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan Indonesia namun tidak bertentangan dengan inti jiwa nasional.
3. menerima dan menyokong perkembangan kebudayaan daerah yang tidak menentang kebudayaan Nasional sebulatnya.

b. Penyelenggaraan sub a di atas :

Harus disiapkan dengan teliti, dan hendaknya diberi pedoman dari Pusat Pemerintah, agar bangsa kita mempunyai pedoman yang tertentu.

Penyelenggaraan kebudayaan seharusnya termasuk usaha Pemerintah (Staatszorg) yang penting.

## URGENSI PROGRAM

1. Mengusahakan terjelmanya Negara kesatuan Indonesia, terbagi atas daerah yang mempunyai autonomie yang luas, tidak hanya mengenai Pemerintahan, namun juga ditentang kebudayaan, dengan menggunakan adanya bentuk federasi sekarang ini sebagai satu tingkat di dalam proses perjuangan Bangsa Indonesia.
2. Memperjuangkan pembangunan Bangsa Indonesia untuk memberi isi kepada Kemerdekaannya serta jurusan yang tertentu bagi perkembangan masyarakat yang sedang di dalam "transition" yang hebat (peredaran dan pergolakan). Untuk itu mengusahakan segera adanya planning-board yang terdiri

atas beberapa terkemuka dari kalangan teoretisi (para maha-guru) bersama-sama dengan ahli di tengah-tengah praktek masyarakat, ialah para terkemuka pemerintahan dan pemimpin-pemimpin partai politik.

3. Mengusahakan adanya susunan perwakilan rakyat yang representatif di pusat maupun di daerah atas dasar perimbangan kekuatan partai-partai politik dan aliran-aliran dalam masyarakat.  
Mengusahakan secepat mungkin terlangsungnya pemilihan umum dan langsung bagi Badan-badan Perwakilan Rakyat.
4. Mengusahakan segera adanya Undang-Undang baru "Negara dalam bahaya" baik bagi R.I.S. maupun mengenai Negara-negara bagian (Daerah-daerah bagian) yang berpokok atas :
  - a. kekuatan militer dan polisi yang penuh dan utuh guna pertanggung-jawab menjaga keamanan keluar dan kedalam.
  - b. jaminan jalannya pemerintahan di tangan orang-orang yang mempunyai keahlian cukup dalam hal ini (pamong praja dan lain-lain sebagainya).
5. Memperjuangkan IRIAN (bekas jajahan Belanda) selekas mungkin menjadi satu bagian dari Indonesia, paling lambat dalam tahun 1951 sudah harus terlaksana. Caranya ialah :
  - a. penduduk Irian sendiri supaya mempunyai dan menghidupkan rasa kenasionalannya.
  - b. Partai supaya mempunyai hubungan yang rapat dengan gerakan-gerakan Irian.
  - c. Mendesak Dewan-dewan Perwakilan Rakyat supaya memasukkan Irian menjadi bagian dari Indonesia.
  - d. bekerja sama dengan semua partai untuk memperjuangkan kedudukan Irian ini.
  - e. hubungan rapat dengan wakil-wakil Indonesia di luar negeri seperti dengan Sdr. Palar dan lain-lain.
6. Segera menempatkan kembali tenaga-tenaga perjuangan untuk dapat dipergunakan kearah rekonstruksi dan pembangunan.

## V. SUSUNAN DEWAN-DEWAN PARTAI.

Ketua : Mr. Wongsonegoro

Ketua : Mr. Wongsonegoro.  
Wakil Ketua I : Mr. Tadjoeeddin Noor.  
Wakil Ketua II : Mr. Harmani.  
Sekretaris Jenderal : Mr. A.W. Soerjodiningrat.  
Seksi Tata Usaha dan Organisasi : Prof. Dr. Hendarmin.

### A. BUREAU POLITIK.

Pemimpin : Mr. Harmani.  
Seksi Luar Negeri : Mr. Wongsonegoro.  
: Mr. Tadjoeeddin Noor.  
: Mr. J. Latuharhary.  
Seksi Dalam Negeri : Mr. Harmani  
: M. Sewaka.  
: Djanuosmadi.  
Seksi Pertahanan : M. Sewaka.  
: Mr. Tadjoeeddin Noor  
: Mr. A.W. Soerjodiningrat.  
Seksi Kehakiman : Mr. J. Latuharhary.  
: Mr. Tadjoeeddin Noor.  
: Mr. Harmani.  
Seksi Penerangan : A.S. Pello.  
: Prof. Dr. Hendarmin.  
(Sub Seksi Pemilihan Umum - Mr. Harmani - dibawah Seksi  
Dalam Negeri)  
(Badan Penerbit "Suara Indonesia" - di bawah Seksi  
Penerangan.

Sidang Pengarang : 1. J. Latuharhary.  
 : 2. Mr. Tadjoeddin Noor.  
 : 3. Prof. Ir. Rooseno.  
 : 4. Prof. Dr. Hendarmin.  
 : 5. Ny. Latuharhary.  
 : 6. Kamil Usman.  
 Sekretaris Redactie : P.A. de Queljoe.  
 Administrateur : A. Entus.

### **B. BUREAU EKONOMI - KEUANGAN.**

Pemimpin : Prof. Ir. Rooseno.  
 Seksi Keuangan : Margono Djojohadikusumo.  
 : Mr. Tadjoeddin Noor.  
 : Mr. Harmani.  
 Seksi Kemakmuran : Mr. Tadjoeddin Noor.  
 : Mr. Wongsonegoro.  
 : Dr. Jusuf Kusumo.  
 Seksi Pembangunan : Prof. Ir. Rooseno.  
 : Prof. Ir. Johannes.  
 : .....  
 (Badan Usaha) : Livat ).

### **C. BUREAU SOSIAL.**

Pemimpin : Prof. Dr. Hendarmin.  
 Seksi Sosial : Dr. St. Z.A. Abidin.  
 : Ny. Dr. Supartinah.  
 : Dr. Sutopo.  
 Seksi Perburuhan : Soedarnadi.  
 : Sudut.  
 : Sarojo.  
 Seksi Kesehatan : Prof. Dr. Hendarmin.  
 : Dr. Soetopo.  
 : Ny. Dr. Soepartinah.

Seksi Pendidikan	: Prof. Ir. Johannes. : Pangeran Purbojo. .....
Seksi Kebudayaan	: Pangeran Purbojo. : Mr. Wongsonegoro. .....
Seksi Agama	: H. Andi Patoppi. .....
Seksi Pemuda	: Kamil Oesman. .....
Seksi Wanita	: Ny. Dr. Soepartinah. Ny. Latuharhary. .....
Pimpinan Harian Partai	: 1. Mr. Wongsonegoro. 2. Tadjoeeddin Noor. 3. A.W. Soerjodiningrat.

## **VI. DAFTAR DARI WAKIL - WAKIL P.I.R. DALAM PEMERINTAHAN DAN DEWAN - DEWAN PERWAKILAN**

### **SENAT R.I.S.**

1. Mr. Tadjoeeddin Noor.
2. Adiwiningun.
3. Anang.
4. Bustan.
5. Soejadi.

### **D.P.R. R.I.S.**

1. Mr. J. Latuharhary.
2. Mohd. Noch.
3. Soedarmadi.
4. Sadak.
5. Soerjaningpradja.

**KABINET R.I.**

1. Dr. Soetopo - Menteri Kesehatan

**SEKRETARIS JENDERAL R.I.S.**

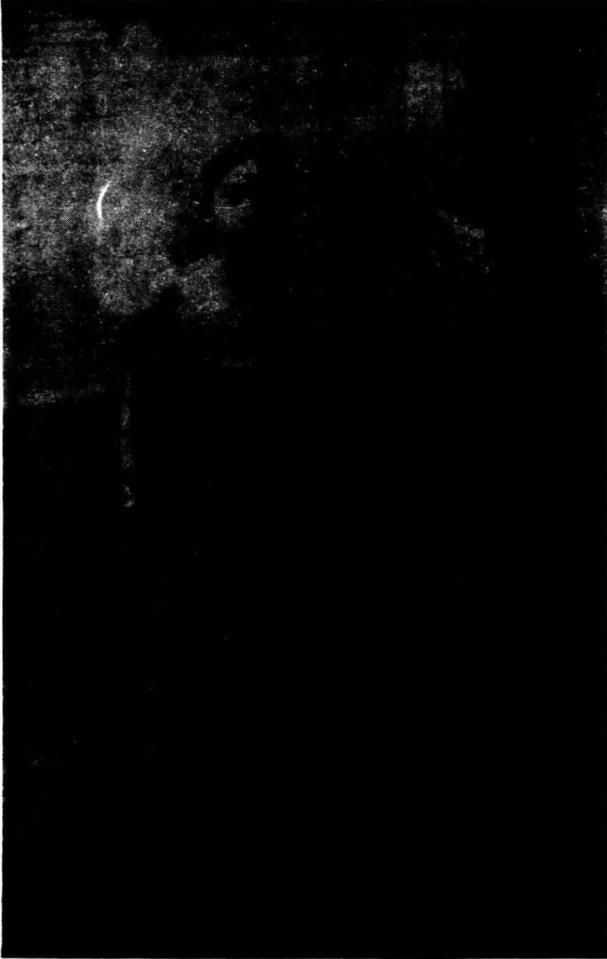
1. Mr. Wongsonegoro - Kementerian Dalam Negeri.
2. Mr. A.W. Soerjodiningrat - Dewan Menteri.

**SEKRETARIS JENDERAL R.I.**

1. Djanu Ismadi - Kementerian Dalam Negeri.
2. Soebagio - Kementerian Perdagangan dan  
- Perindustrian

**N.I.T.**

1. Hoesen - Ketua Parlemen.



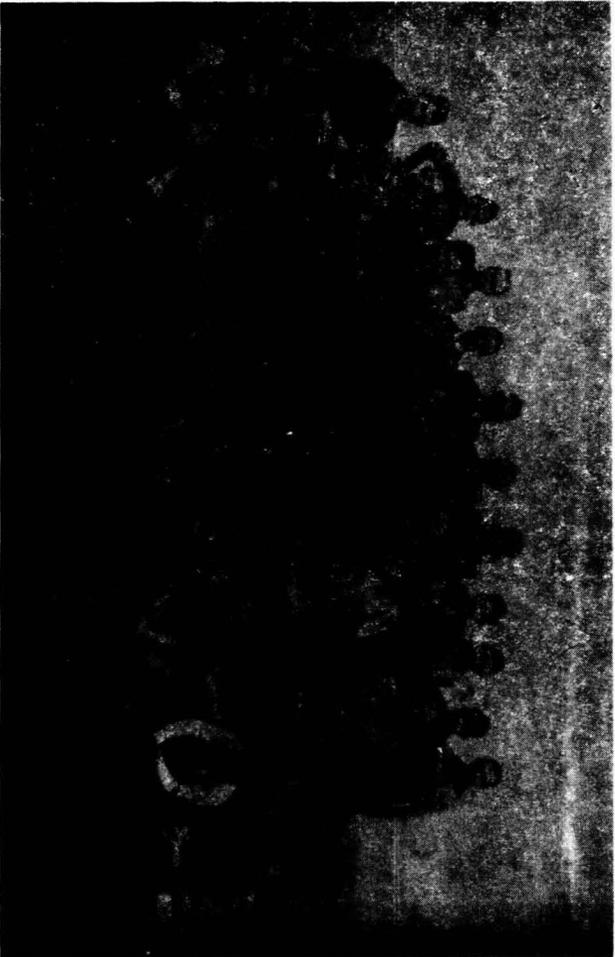
*Foto G.P. Puruboyo ketika masih remaja*



*G.P. Puruboyo dengan isteri dan kedua orang puteranya*



*Foto tahun 1934. Di barisan depan nomor 2 dari kanan adalah G.P. Puruboyo*



*Di baris depan nomor 2 dari kanan adalah G.P. Puruboyo  
dengan klub sepakbolanya.*



*Yang tampak membawa pedang adalah foto  
G.P. Puruboyo pada tahun 1937 di Negeri Belanda.*



*G.P. Puroboyo sedang makan bersama dengan anak Gubernur  
Bijleveld, anak Gubernur Jendral Tjarda, kemenakan  
G.J. Tjarda dan Mr. Sidarto*



*Rapat Partai P.I.R. Yang tampak berkacamata dan duduk  
di samping pembicara (Mr. Wongsonegoro) adalah  
G.P. Puruboyo*



*Foto G.P. Puruboyo pada tahun 1926 yaitu ketika beliau menghadiri pabrik cerutu "Hillen" di Delft Negeri Belanda*

MULYONO

GUSTI PANGERAN PURUHOTO

Perpustakaan  
Jenderal K

920.  
M